



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat

- :
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat RPB adalah Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan organisasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memandu perencanaan organisasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan organisasi masyarakat agar selaras dengan perencanaan penanggulangan bencana; dan
- b. mendukung pengurangan risiko bencana di Provinsi secara menyeluruh dan terencana baik.

BAB II

RANCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

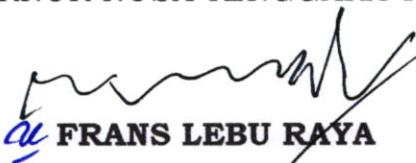
- (2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN
 - c. BAB III PENILAIAN RESIKO BENCANA
 - d. BAB IV PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - e. BAB V MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA
 - f. BAB VI ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juni 2018

↗ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ↗

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ↗


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 024



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 Juni 2018

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2018 – 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki banyak persebaran gugusan pulau besar dan kecil. Luas wilayah daratan Provinsi NTT adalah 7.345.000 ha tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau berpenghuni dan 1.149 pulau tidak berpenghuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit dan dataran yang memiliki kemiringan di atas 40% mencapai 35,46% dari luas wilayah NTT.

Letak Provinsi NTT secara fisik berbatasan dengan Laut Flores di bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Benua Australia, bagian timur berbatasan dengan Negara Republic Democratic Timor Leste dan Laut Timor serta bagian barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letak geografis seperti ini, menempatkan NTT, baik dari sisi klimatologi, topografi, geologis, demografi dan sosiologis, sangat berpotensi bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, rawan pangan, gempa, tsunami, abrasi pantai, konflik, wabah penyakit dan lain-lain.

Laporan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan adanya peningkatan kejadian bencana yang dilaporkan sejak 1950 hingga 2017. Dalam periode 10 tahun pertama, jumlah kejadian tidak mencapai 10. Angka tersebut meningkat sangat tajam, tercatat lebih dari 600 kejadian bencana antara 1960 hingga 2017. Jumlah bencana terbesar adalah bencana hidrometeorologis atau yang berhubungan dengan iklim (75%) dalam bentuk kekeringan, banjir dan kebakaran hutan di dataran Timor, Sumba dan Flores. Bencana hidrometeorologis ini tidak banyak menyebabkan kematian, namun merusak aset penghidupan masyarakat terkena dampak. Sedangkan bencana geologi, seperti gempa bumi dan tsunami, hanya 14% dari jumlah kejadian bencana di NTT, namun telah membunuh 5,500 jiwa di daratan Flores, Lembata dan Alor.

Karena NTT berada dalam wilayah yang rawan bencana, dengan sendirinya ini menjadi tantangan serius. Dalam skenario lunak bencana dapat mengakibatkan tekanan yang besar terhadap anggaran pemerintah. Bencana juga dapat meningkatkan kerentanan masyarakat dan sekaligus mereduksi berbagai kapasitas dalam aspek sumber daya sosial, manusia, finansial, alam dan infrastruktur.

Dengan kondisi daerah berisiko bencana seperti ini, maka upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang terstruktur, sistematis dan berkesinambungan, perlu dibuat Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). RPB berfungsi sebagai sebuah dokumen yang digunakan untuk harmonisasi agenda Penanggulangan

Bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT. Dengan demikian dokumen RPB ini akan menjadi rujukan bagi program pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah dalam menjalankan aktifitas di setiap sektor.

Dokumen RPB disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dan memuat juga Kebijakan, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, RPB memuat kajian tentang ancaman yang ada di Provinsi NTT dengan memaparkan tinggi, sedang atau rendahnya tingkat 11 jenis ancaman bencana di NTT tersebut. Lebih lanjut, dipaparkan juga kajian tentang tingkat kapasitas dan kerentanan wilayah, pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Sehingga bersama – sama, tingkat ancaman, kapasitas dan kerentanan menghasilkan tingkat risiko bencana di Provinsi NTT untuk masing – masing jenis ancaman bencana. Berdasarkan kondisi risiko bencana itulah, ditentukan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang paling tepat untuk menanggulanginya.

Penyusunan RPB melalui beberapa tahapan. Pertama adalah identifikasi data (kuisioner, interview, lokakarya, diskusi grup), dilanjutkan dengan analisis data, dan penulisan draft. Tahap terakhir adalah konsultasi publik untuk melihat apakah RPB telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan RPB telah melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kebencanaan. Mereka terdiri dari akademisi, organisasi non-pemerintah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan swasta, media massa, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain-lain.

Untuk mengaktifkan RPB ini, maka tahapan lanjutan yang harus dilalui adalah melegalisasi dokumen RPB, baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Bila sudah menjadi dokumen legal maka bisa ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan diimplementasikan.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

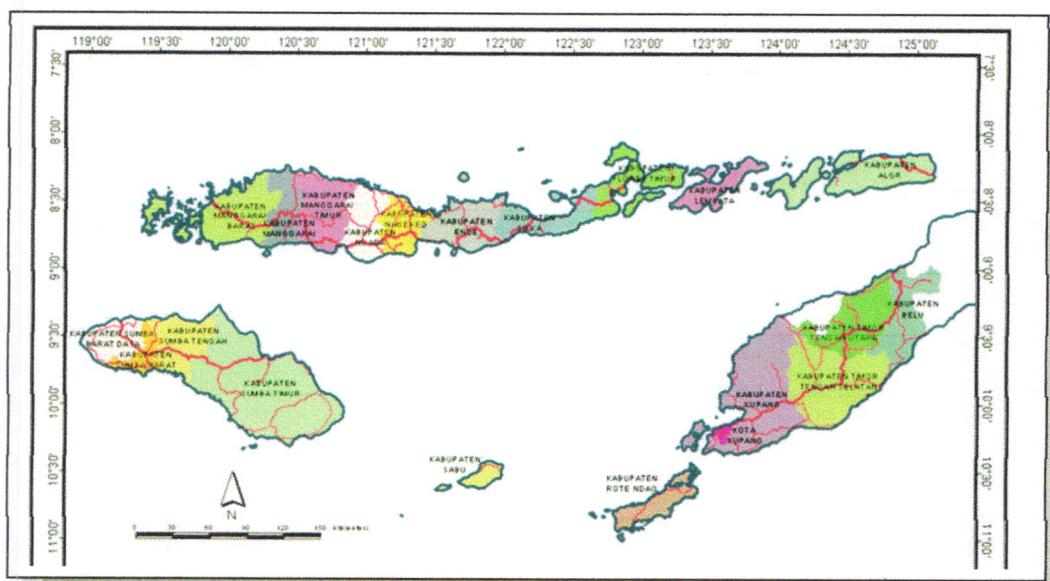
1. Mempersiapkan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Meningkatkan kinerja lembaga dan instansi Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Mensinergikan kinerja pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari bahaya yang mengancam.

1.3. RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku di wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Diharapkan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan solusi dalam menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaannya, RPB ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang Pemerintah Provinsi dan dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten. Di internal pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPB ini terbatas dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi/stimulasi Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota, RPB ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan RPB Kabupaten/ Kota yang berisikan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan kondisi lokal.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi NTT

Dari lingkup fase bencana yang dibahas, RPB ini mencakup seluruh tahapan dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, pada saat dan setelah bencana, yaitu :

1. fase mitigasi/pencegahan,
2. fase kesiap-siagaan,
3. fase tanggap darurat, dan
4. fase pemulihan bencana.

Sementara itu, jenis bencana yang dibahas dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini, disesuaikan dengan tipe bencana yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sedangkan prioritas bencana yang ditangani dalam RPB disesuaikan dengan kondisi daerah yang diperoleh dari identifikasi data dan hasil penampungan ide secara partisipatif dari seluruh kelompok yang terlibat dalam penyusunan RPB ini.

1.4. LANDASAN HUKUM

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 –2023 dibuat berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Landasan-landasan hukum tersebut adalah:

Penyusunan Dokumen RPB berlandaskan pada regulasi terkait penanggulangan bencana, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 13 fungsi BNPB meliputi “perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien”. Landasan ini yang menghasilkan dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (JAKSTRA PB) 2015-2019.
 - d. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan RENAS PB dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
 - e. Pasal 36 ayat 2 bahwa dokumen RENAS PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu RENAS PB adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2018.

1.5. PENGERTIAN

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bencana (*disaster*)** adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam (seperti gempa-bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit) atau ulah manusia (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat dan teror) sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. **Bahaya/Ancaman (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
4. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
5. **Risiko (*risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. **Pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
7. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
8. **Mitigasi Fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.

9. **Mitigasi Non-Fisik (*non structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
10. **Kesiap-siagaan (*preparedness*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat-guna dan berdaya-guna.
11. **Peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Tanggap darurat (*emergency response*)** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
13. **Bantuan darurat (*relief*)** bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
14. **Pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
15. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.
16. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.
17. **Penanggulangan Bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiap-siagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. **Korban bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. **Prosedur Tetap** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
23. **Gagal teknologi** adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media/aplikasi tertentu.
24. **Pengurangan Risiko Bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.

25. **Risiko Tinggi** adalah daerah yang mempunyai tingkat potensi tinggi terhadap dampak bencana yang dihasilkan dari hasil perhitungan pembobotan dengan menggunakan metode AHP dan hasil tumpang susun dari peta ancaman, kerentanan dan kapasitas.
26. **Risiko Sedang** adalah daerah yang mempunyai tingkat potensi sedang terhadap dampak bencana yang dihasilkan dari hasil perhitungan pembobotan dengan menggunakan metode AHP dan hasil tumpang susun dari peta ancaman, kerentanan dan kapasitas.
27. **Risiko rendah** adalah daerah yang mempunyai tingkat potensi rendah terhadap dampak bencana yang dihasilkan dari hasil perhitungan pembobotan dengan menggunakan metode AHP dan hasil tumpang susun dari peta ancaman, kerentanan dan kapasitas.

1.6. SISTEMATIKA

Dokumen ini disusun sesuai Sistematika yang diatur dalam PERKA BNPB Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

BAB 3 PENILAIAN RISIKO BENCANA

BAB 4 PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB 5 MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

BAB 6 ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA

BAB 7 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

2.1. KONDISI FISIK WILAYAH

2.1.1. Geografi

A. Posisi Geografis dan Batas Wilayah Administratif

Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Batas-batas wilayah;

- sebelah utara : Laut Flores,
- sebelah selatan : Samudera Hindia,
- sebelah timur : Negara Republik Timor Leste, dan
- sebelah barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 44 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau belum dihuni. 246 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Diantara pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar, yaitu Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar, antara lain: Adonara, Babi, Lembata, Pamana Sikka, Solor, Pulau Dana, Rote, Sabu, Semau, Komodo, Rinca, Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur), dll. Dari seluruh pulau yang ada, 42 pulau telah berpenghuni sedangkan sisanya belum berpenghuni.

Hampir semua pulau di wilayah NTT terdiri dari pegunungan dan perbukitan kapur. Dari sejumlah gunung yang ada terdapat gunung berapi yang masih aktif. Di pulau Flores, Sumba dan Timor terdapat kawasan padang rumput (savana) dan stepa yang luas.

Luas wilayah daratan 48.718,10 km² (2,49% luas Indonesia) dan luas wilayah perairan ± 200.000 km² diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Secara Administratif, NTT meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota. Secara rinci luas wilayah daratan menurut Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nama Kabupaten dan Ibukota serta Luas Wilayah

No	Kabupaten	Ibukota	Luas Daerah	Persentase
1	Sumba Barat	Waikabubak	2,183.18	4,48
2	Sumba Timur	Waingapu	7,000.50	14,37
3	Kupang	Sulamu	5,434.76	11,16
4	Timor Tengah Selatan	Soe	3,947.00	8,10
5	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	2,669.70	5,48
6	Belu	Atambua	1,284.97	2,63
7	Alor	Kalabahi	2,864.60	5,88
8	Lembata	Lewoleba	1,266.00	2,60
9	Flores Timur	Larantuka	1,813.20	3,72

10	Sikka	Maumere	1,731.90	3,55
11	Ende	Ende	2,046.50	4,20
12	Ngada	Bajawa	1,645.88	3,38
13	Manggarai	Ruteng	2,096.44	4,30
14	Rote Ndao	Rote Ndao	1,280.00	2,63
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo	2,397.03	4,92
16	Sumba Barat Daya	Wetabula	1,480.46	3,04
17	Sumba Tengah	Waibakul	1,868.74	3,84
18	Nagekeo	Mbay	1,416.96	2,91
19	Manggarai Timur	Borong	2,642.93	5,42
20	Sabu Raijua	Seba	460.54	0,94
21	Kota Kupang	Kupang	26.18	0,05
22	Malaka	Betun,	1.160.63	2,38
NTT			48,718.10	100,0

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT

B. Topografi, Kemiringan Lereng, dan Geologi

Ditinjau berdasarkan ketinggiannya, 48,78% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada rentang ketinggian 100 – 500 meter dari atas permukaan air laut atau sekitar 2.309.747 Ha. Sedangkan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m hanya sebagian kecilnya saja, yaitu sebesar 3,65%. Berdasarkan kemiringan tanahnya, Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh tanah dengan kemiringan lereng 15 – 40 %. Bagian terbesar lainnya adalah tanah dengan kemiringan lebih dari 40%, yaitu sebesar 1.678.948 Ha atau 35,46% dari luas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besar kecilnya kemiringan lereng mempengaruhi tingkat erosi.

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum – Pasifik sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores, memiliki struktur tanah yang labil (sering terjadi patahan). Pulau – pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik, sedangkan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor, dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan. Dengan kondisi ini maka jalur pulau – pulau yang terletak pada jalur vulkanik dapat dikategorikan subur namun sering mengalami bencana alam yang dapat mengancam kehidupan penduduk yang menetap di daerah tersebut.

C. Jenis Tanah

Adanya perbedaan iklim, cuaca geologi dan lain-lain menghasilkan adanya perbedaan jenis tanah yang terdapat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai jenis tanah, keadaan kemiringan tanah, tekstur tanah, drainase tanah, dan tingkat erosi tanah. Berdasarkan jenis tanahnya, sebagian besar adalah tanah dengan jenis mediteran, yaitu seluas 2.415.420 Ha atau 51% dari luas Provinsi NTT, kemudian tanah kompleks seluas 1.527.569 Ha. Sedangkan sisanya memiliki jenis tanah latosol, grumusol, andosol, aluvial, dan legosol.

Provinsi ini sebagian besar tanahnya memiliki kedalaman efektif tanah 0 – 30 cm, yaitu sebesar 40,94 % dari luas wilayah NTT atau seluas 1.938.403 Ha. Sedangkan kelas kedalaman 30 – 60 cm memiliki sebaran sebesar 25,06% dari luas wilayah atau sebesar 1.186.801 Ha, kelas 60 – 90 cm, sebesar 10,555 atau 499.707 Ha dan sisanya 21,03% atau 995.489 Ha memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm.

Berdasarkan tingkat erosi tanahnya, hampir 60% dari luas tanah di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mengalami erosi. Tanah yang tererosi ini banyak dijumpai pada tanah – tanah dengan jenis penggunaan tanah untuk ladang, alang-alang atau semak belukar dan memiliki kemiringan lereng di atas 40 %.

D. Penggunaan Lahan

Pola dan struktur pemanfaatan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kondisi alam dan jenis kegiatan di setiap Kabupaten/ Kota. Sesuai dengan kondisi iklim dan tipe tanah, sebagian lahan di NTT didominasi lahan kering dan sebagian kecil lahan untuk kegiatan pertanian lahan basah (sawah) seluas ± 210.773 Ha. Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan perkawasan sebagai berikut :

1. *Kawasan Lindung*, antara lain :
 - a. Hutan Lindung;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya;
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan setempat;
 - d. Suaka Alam dan Cagar Alam;
 - e. Cagar Budaya.
2. *Kawasan Budidaya*, antara lain :
 - a. Kegiatan Pertanian; lahan kering dan lahan basah;
 - b. Kegiatan Peternakan;
 - c. Kawasan Perikanan;
 - d. Kawasan Perindustrian;
 - e. Kawasan Pertambangan;
 - f. Kawasan Pariwisata;
 - g. Kawasan Permukiman : Perkotaan – Perdesaan.

Untuk lebih jelasnya luasan pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi NTT Tahun 2015

KABUPATEN / KOTA	Permukiman	Sawah	Irigasi	Sawah	Tadah	Ladang	Perkebunan	Hutan			Padang Rumput	Lahan Kritis	Rawarawa	Tambak	Kolam /Empangan	
		Tadah Hujan	Hujan	Tegalan	Rak yat	Lindung	Suaka Alam	Produksi								
Sumba Barat	953	2,844		6,686	12,547	7,401	2,488	1,189.72	1,772.22	6,298.61	8,257	73,742	-	-	2	
Sumba Timur	8396	15,489	11,437	53,982	28,480	16,078		74,012.99	56,931.61	111,403.38	48,196	700,050	133,269	28	126	
Kupang	9906	5,358	16,619	39,114	34,785	24,560	106,131.81	69,978.16		102,997.83	76,753	543,772	514	256	250	
Timor Tengah Selatan	7250	9,766		902	70,264	53,570	21,976	54,436.77	16,991.04		47,135.08	47,343	394,700	4	3	49
Timor Tengah Utara	20647	11,342	2,658	21,297	23,950	25,736	40,266.66	2,405.33		68,934.23	28,078	266,966	249	414	57	
Belu	11874	4,981	2,392	25,958	13,133	6,662	35,522.01		-	1,571.87	16,904	244,557	99	497	50	
Alor	10532	769	2,680	5,285	14,992	19,427	50,368.55	7,637.67		46,709.16	18,775	286,460	9,193	13	-	
Lembata	7383	70	24	13,959	7,291	15,890	48,778.99		-	599.77	7,636	126,638	5,381	-	-	
Flores Timur	2794	846		367	22,043	17,693	25,000	37,661.75		-	17,616.29	14,707	181,285	8	14	-
Sikka	3659	2,312		274	27,133	21,956	29,787	33,929.50	72,998.68		1,746.52	11,036	173,192	-	-	-
Ende	3168	6,246	2,002	28,861	26,637	23,190	20,926.35	7,065.57		37,176.17	5,362	204,662	-	16	-	
Ngada	1450	5,910	687	18,295	11,133	14,725	30,171.05	16,714.07		35,687.91	17,754	162,092	4,992	105	-	
Manggarai	2685	10,472	3,107	20,612	16,973	14,552	17,316.14	8,943.69		1,155.14	22,174	169,435	199	126	34	
Rote Ndao	1699	5,185	13,486	6,391	5,895	6,689	7,432.59	3,648.07		9,234.74	23,130	128,000	430	122	29	
Manggarai Barat								179,107.31								
	4072	11,513	5,274	16,075	4,658	12,635	53,978.96		18,067.00	40,694	294,750	217	42	20		
Sumba Tengah	1529	2,737	4,864	11,191	6,854	4,165	6,328.41	32,382.82		21,156.61	30,088	186,918	69	-	71	
Sumba Barat Daya	4111		4,521	33,681	18,943		11,097.92		-	8,420.48		144,532	-	-	2	

		3,556				15,053				18,842				
Nagekeo	1401	4,569	1,673	30,811	1,964	15,976	9,543.32	-	18,823.43	15,996	141,696	20	240	-
Manggarai Timur	5850	9,305	4,779	37,430	21,424	19,999	33,880.56	23,856.58	19,298.30	11,142	249,455	-	19	34
Sabu Raijua	*	1,184	253	3,056	4,446	*	9,877.97	-	-	*	46,054	*	*	*
Malaka	*	7,875	3,370	28,286	3,870	*	3,480.84	7,661.08	5,595.87	*	*	*	*	*
Kota Kupang	2006	209	180	1,126	540	617	1,493.44	-	-	724	16,034	1	5	-
NTT	111,365	122,538	88,235	527,397	346,588	315,205	687,826.300	508,093.90	579,628.39	463,591	4,734,990	154,645	1,900	724

Sumber: Hasil Kompilasi NTT dalam Angka 2010, 2015

E. Hidrologi

Secara umum keadaan hidrologi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama air permukaan, agak kurang. Hal ini disebabkan karena musim hujan dalam satu tahun hanya berlangsung selama 3 bulan. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan oleh penduduk. Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk dari beberapa sungai dan danau. Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 27 DAS dengan luas keseluruhan 1.527.900 Ha. Sungai yang terpanjang di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain (100 Km), yang terdapat di sepanjang Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka. DAS terluas adalah DAS Benain, seluas 329.841 Ha (21,58%), dan DAS terkecil adalah DAS Oka, seluas (0,27%).

F. Iklim

Keadaan iklim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada Bulan Juni – September arah angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arah angin yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan.

Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember. Walaupun demikian, mengingat Nusa Tenggara Timur dekat dengan Australia, arah angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di wilayah ini berkurang. Hal inilah yang menjadikan Provinsi ini sebagai wilayah yang tergolong kering dimana 4 (empat) bulan (Januari s/d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Suhu udara rata – rata maksimum berkisar pada 30 sampai 36 derajat Celcius dan rata-rata suhu minimum antara 21 derajat sampai 24,5 derajat Celcius, dengan curah hujan rata – rata adalah 1.164 mm/ tahun. Tingkat curah hujan ini berbeda – beda tiap daerah, seperti Wilayah Flores bagian barat, yang meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Ngada, merupakan daerah yang cukup basah, hal ini disebabkan curah hujan rata – ratanya lebih tinggi dari rata – rata total, yaitu 3. 849 mm/tahun.

G. Flora dan Fauna

Jenis flora di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diidentifikasi menurut jenis dan tingkat keragamannya, yaitu jenisnya flora yang berhubungan dengan faktor lingkungan. Tipe hutan yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tipe hutan hujan dan hutan payau. Tipe hutan hujan terdapat di puncak-puncak gunung yang beriklim basah seperti di Gunung Mutis, Timau dan Lakaan. Sedang hutan payau terdapat di bagian pantai pulau Timor, antara lain terdapat di Atapupu dan Bena.

Sedangkan vegetasi berbentuk padang rumput terdapat di berbagai lokasi, baik di luar maupun di dalam kawasan hutan. Kelompok hutan yang memiliki padang rumput luas adalah Mutis, Timau, Bifemnasi, Sanmahole, Lakaan, Mandeau dan Laob Tunbesi.

2.1.2. Tata Ruang Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mereview rencana tata ruang wilayahnya pada tahun 2010, dimana RTRW ini berlaku dari 2010-2030.

Struktur Ruang. Menerapkan sistem Pusat-pusat kegiatan pada wilayah provinsi merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKLp). Struktur ruang ini ditunjang prasarana wilayah yang berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, kegiatan ekonomi dan aksesibilitas antar wilayah.

Pola Ruang. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

A. Struktur Ruang

Secara konsepsional, Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 merupakan instrument perencanaan untuk:

- Menjabarkan RTRW di wilayah provinsi NTT sekaligus sebagai kontribusi untuk pembangunan nasional dan memadukan pembangunan antar daerah kabupaten/kota.
- Meningkatkan laju dan tingkat pertumbuhan wilayah yang mempunyai sumber daya alam dan lokasi strategis serta secara historis menguntungkan peningkatan wilayah lainnya.
- Mengurangi kesenjangan antar daerah kabupaten/kota.
- Meningkatkan interaksi antar pusat-pusat pelayanan yang ada.
- Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah di belakangnya.
- Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban terutama pada kota-kota PKL sehingga terjadi penekanan terhadap urbanisasi pada kota sedang dan besar.
- Mengembangkan pusat-pusat permukiman PKL kecil melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- Mengembangkan daya guna wilayah tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rencana struktur ruang wilayah meliputi system pusat kegiatan dan system jaringan prasaran wilayah. Pengembangan system pusat kegiatan di provinsi NTT 2010 – 2030 dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini:

Tabel 2.3 Arahan Struktur Ruang pada RTRW Provinsi NTT 2010-2030

1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Kupang
2	Pusat Kegiatan Nasional promosi PKNp	Waingapu, Maumere
3	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Soe, Kefamenanu, Ende, Ruteng, Labuan Bajo
4	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Tambolaka, Bajawa, Larantuka, Waikabubak, Atambua, Mbay
5	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Oelamasi, Ba'a, Seba, Lewoleba, Kalabahi, Waibakul, Borong
6	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Atambua, Kefamenanu, Kalabahi

Sumber: RTRW Provinsi NTT 2010 – 2030, Bappeda Provinsi NTT

B. Pola Ruang

Pola Ruang provinsi NTT berdasarkan RTRW Provinsi NTT Tahun 2006-2020 meliputi pola ruang kawasan lindung dan pola ruang kawasan budidaya. Arahan pola ruang RTRW dapat dilihat pada table 2.12 berikut ini.

Tabel 2.4 Arahan Pola Ruang RTRW Provinsi NTT 2010 – 2030

No	Arahan Kawasan	Luas (ha)	Arahan Kawasan	Luas (ha)
	Kawasan Lindung	1,192,744	Kawasan Budaya	3,532,155
1	Cagar Alam	51,015	Bandar Udara	87
2	Hutan	179,188	Daerah Pemukiman	44,278
3	Hutan Bakau	16,330	Daerah Wisata	4,157
4	Hutan Lindung	694,461	Hutan Produksi	311,542
5	Suaka Margasatwa	13,618	Hutan Produksi	110,030
6	Sungai/Danau	13,618	Hutan Produksi	232,108
7	Taman Buru	4,924	Lahan Penggembalaan	639,782
8	Taman Nasional	157,774	Pertanian Lahan Basah	96,454
9	Taman Wisata Alam	61,815	Pertanian Lahan Kering	2,093,718

Sumber: RTWR Provinsi NTT 2010-2030, Bappeda Prop NTT

Kawasan Lindung

Pemantapan kawasan lindung dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang provinsi yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat ditentukan arahan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan produksi maupun permukiman. Delineasi terhadap fungsi-fungsi kawasan lindung di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

- ✓ Kawasan lindung yang telah ditetapkan yang sebagian besar terdapat di Pulau Flores dengan beberapa pulau di sekitarnya, seperti Pulau Alor, Lembata dan Pulau Adonara;
- ✓ Kawasan Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni namun mempunyai keunikan dan menjadi tempat perlindungan aneka flora dan fauna serta aneka satwa;
- ✓ Wilayah-wilayah karena kebutuhan posisi geografisnya yang berpotensi sebagai kawasan lindung.

Secara keseluruhan luas pemantapan kawasan lindung di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan 1.690.684,2 Ha atau sekitar 35,7 % dari luas wilayah Provinsi. Komposisi dan sebaran kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.13

Tabel 2.5 Luas Kawasan Lindung menurut Kelompok Pulau Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004

Wilayah	Kelompok Pulau	Luas Pulau (Ha)	Kawasan Lindung	
			Luas (Ha)	Persen (%)
Timor	P. Timor	1439490,0	382850,0	26,6
	P. Semau	26100,0	500	44,1
	P. Kera	-	62,5	-
	P. Kambing	-	125	-
	P. Rote	212430,0	38025,0	31,3
	P. Sabu	42170,0	9850,0	23,4
	P. Mdana	-	1.562,50	-
	Jumlah	-	432975,0	-
Alor	P. Alor	207340,0	97875,0	47,2
	P. Pantar	71180,0	12687,0	17,8
	P. Pura	2818,0	1125,0	39,9
	P. Batang	-	250	-
	P. Lapang	-	125	-
	P. Rusa	-	1375,0	-
	Jumlah	-	113437,0	-
	Flores dan Sekitarnya			
	P. Flores	1423000,0	276936,0	19,4
	P. Komodo	33240,0	332,24,8	99,9
	P. Rinca	21250	21215,0	99,8
	P. Padar	-	1.718,70	-
	P. Kode	-	700	-
	P. Gilimotang	-	925	-
	P. Moles	-	1.587,50	-
	P. Palue	-	4625	-
	P. Besar	-	4.062,50	-
	P. Sukun	-	375	-
	P. Konga	-	62,5	-
	P. Adonara	51880	32.562,50	62,8
	P. Solor	22620,0	5.587,50	29,6
	P. Lembata	126600,0	19.093,60	15,1
	Jumlah	-	403.775,60	-
Sumba dan Sekitarnya	P. Sumba	1104000,0	193.601,50	17,5
	P. Dana			
Total NTT		4693188,0	1.154.789,60	24,4

Sumber: Bappeda Provinsi Tahun 2004

Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan terhadap perkembangan bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka teridentifikasi beberapa daerah rawan bencana sebagai berikut:

Daerah Rawan Gempa Bumi : Nusa Tenggara Timur termasuk daerah rawan bencana alam gempa terutama wilayah Pulau Flores, Alor dan sekitarnya;

Daerah Rawan Tsunami: Sebagai Provinsi kepulauan yang dikelilingi laut, daerah pesisir terutama daerah pesisir dengan laut terbuka di Pesisir Flores bagian Utara, Pesisir Sumba bagian Selatan, Pesisir Timor bagian selatan dan pulau-pulau yang berhadapan dengan laut terbuka merupakan daerah rawan tsunami;

Daerah Rawan Bencana Gunung Api: Wilayah di Pulau Flores dan Kepulauan Alor yang memiliki beberapa gunung berapi aktif dan beberapa daerah memiliki kawasan rawan bencana gunung api;

Daerah Rawan Longsor: Nusa Tenggara Timur sebagai daerah dengan topografi berbukit yang relatif kritis akibat usaha bertani yang kurang terkontrol dan penggundulan hutan mempunyai daerah rawan longsor relatif merata di seluruh wilayah. Diantara yang cukup rawan dan telah merengut nyawa dan harta penduduk diantaranya di wilayah Flores khususnya di Kabupaten Ende, Flores Timur dan Manggarai (DIBI, 2017);

Daerah Rawan Banjir: Sehubungan dengan kurangnya vegetasi pada hulu-hulu sungai mengakibatkan banyak sungai membawa dampak rawan banjir. Terdapat beberapa sungai yang perlu diantisipasi karena menimbulkan rawan banjir sebagai berikut :

- ✓ Kota Kupang : Sungai Oebobo, Sungai Oesapa Kecil, Sungai Oesapa Besar, Sungai Sefbano, Sungai Namosain dan Kali Dendeng;
- ✓ Kabupaten Alor : Sungai Bone, Sungai Buona, Sungai Bukapiting, sungai Waesika, dan Sungai Kamot;
- ✓ Kabupaten Belu Sungai Motaderok, Sungai Talau Sungai Malibaka, dan Sungai Rusan;
- ✓ Kabupaten Malaka : Sungai Benanain, Sungai Basikama;
- ✓ Kabupaten Timor Tengah Utara : Sungai Nain, Sungai Ponu;
- ✓ Kabupaten Timor Tengah Selatan : Sungai Noelmina, Sungai Muke, Sungai Tomutu, Sungai Baus;
- ✓ Kabupaten Kupang : Sungai Manikin, Sungai Nunkurus, Sungai Oepoli, Sungai Amabi, Sungai Nifoluam, Sungai Manubulu, dan Sungai Ledean;
- ✓ Kabupaten Manggarai : Sungai Waebobo, Sungai Waepesi, Sungai Waemese;
- ✓ Kabupaten Ngada : Sungai Aisesa, Sungai Anakoli, Sungai Waewutu, Sungai Kolpenu;

- ✓ Kabupaten Ende : Sungai Wolowona, Sungai Loworea, Sungai Nangapanda, Sungai Wolowaru, dan Sungai Ndondo;
- ✓ Kabupaten Sikka : Sungai Kaliwajo, Sungai Ijura, Sungai Waeoti, Sungai Nebe, Sungai Waegete, Sungai Manunaing, Sungai Waerklaau, dan Sungai Batikwaer;
- ✓ Kabupaten Lembata : Sungai Lembata, Sungai Konga, Sungai Waekomo;
- ✓ Kabupaten Sumba Timur : Sungai Kambaniru, Sungai Payeti, Sungai Melolo, Sungai Petawang, Sungai Tawui, Sungai Kadaha.

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya pada dasarnya merupakan kawasan diluar lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan ruang untuk permukiman. Dalam RTRWP Nusa Tenggara Timur penetapan kawasan ini lebih bersifat memberikan arahan bagi pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya (terutama lahan) yang ada dan dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya di RTRWP NTT klasifikasikan sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan, Kawasan Perindustrian, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.2. KONDISI SOSIAL WILAYAH

2.2.1. Demografi

Penduduk Nusa Tenggara Timur menurut hasil SENSUS Penduduk tahun 2010 berjumlah 4.683.827 jiwa, dengan kepadatan 108 jiwa/km². Data proyeksi jumlah penduduk NTT tahun 2016 adalah 5.203.514 jiwa. Bila dilihat penyebarannya Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak (8.87%) sedangkan Kabupaten Sumba Tengah adalah kabupaten yang paling sedikit jumlah penduduknya (1,34%). Kota Kupang tetap menjadi kota terpadat di NTT.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk per Kabupaten/Kota Proyeksi 2015/2016 Terpilah Gender

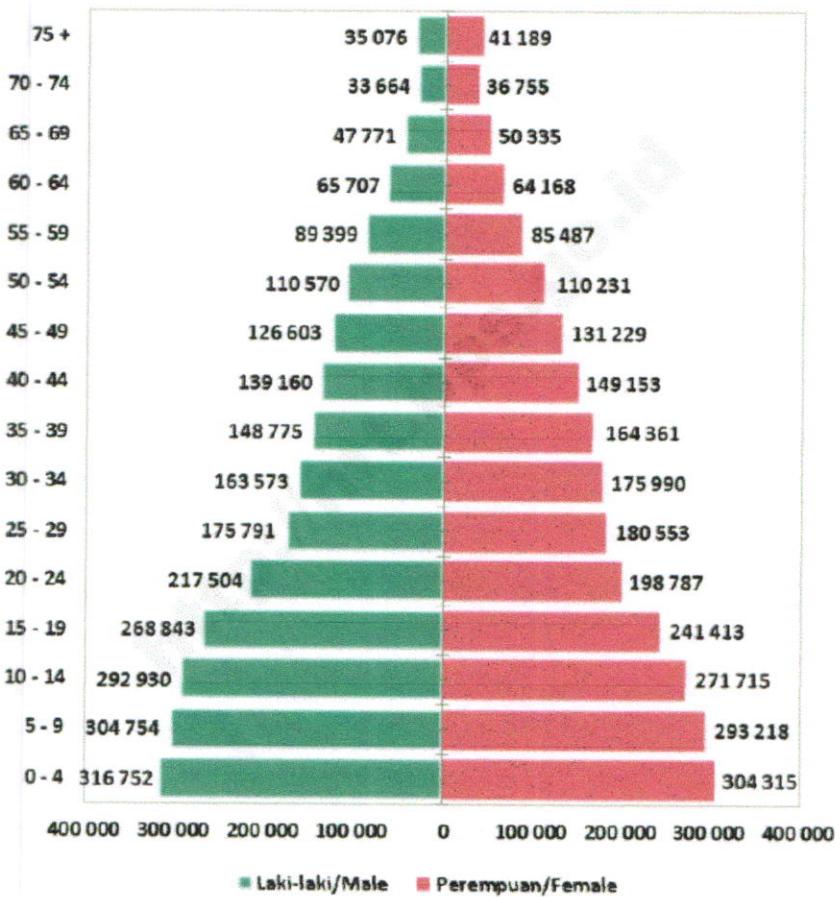
Wilayah	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Sumba Barat	62.981	64.018	58.940	59.895	121.921	123.913
Sumba Timur	126.487	128.201	119.807	121.405	246.294	249.606
Kupang	177.927	184.314	170.083	175.914	348.010	360.228
Timor Tengah Selatan	226.694	227.877	232.616	233.804	459.310	461.681
Timor Tengah Utara	120.997	122.209	123.717	125.007	244.714	247.216
Belu	103.402	105.187	103.376	105.120	206.778	210.307
Alor	97.475	98.287	102.440	103.228	199.915	201.515
Lembata	61.980	62.986	70.191	71.587	132.171	134.573



Flores Timur	118.226	118.779	128.768	130.110	246.994	248.889
Sikka	148.125	149.189	165.384	166.288	313.509	315.477
Ende	127.722	128.230	142.002	142.656	269.724	270.886
Ngada	75.620	75.823	79.073	80.278	154.693	156.101
Manggarai	156.576	158.378	163.031	165.636	319.607	324.014
Rote Ndao	75.292	78.328	72.486	75.464	147.778	153.792
Manggarai Barat	124.620	127.409	127.069	130.173	251.689	257.582
Sumba Tengah	35.279	35.913	33.236	33.693	68.515	69.606
Sumba Barat Daya	163.781	167.195	155.338	158.504	319.119	325.699
Nagekeo	67.917	68.594	71.660	72.716	139.577	141.310
Manggarai Timur	134.418	136.792	138.096	139.828	272.514	276.620
Sabu Raijua	43.984	45.406	41.986	43.420	85.970	88.826
Malaka	87.283	88.709	93.099	94.678	180.382	183.387
Kota Kupang	200.086	206.129	190.791	196.157	390.877	402.286
Nusa Tenggara Timur	2.536.872	2.577.953	2.583.189	2.625.561	5.120.061	5.203.514

Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka 2016, BPS Provinsi NTT

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk periode 2014 - 2015 yaitu 1,65 %. Angka tersebut menurun dari periode sebelumnya 2000 – 2010 sebesar 2,97%. Sedangkan pada periode 1990 - 2000 sebesar 1,6%/tahun. Kepadatan penduduk terbesar di Kota Kupang (2.432 jiwa/km2) dan terendah di Kabupaten Sumba Timur (35 jiwa/km2). Kabupaten lain yang juga cukup padat penduduknya (di atas 150 jiwa/km2) adalah Kabupaten Sumba Barat, Belu, Sikka, Manggarai, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua dan Malaka. Sedangkan kabupaten sisanya kepadatan penduduknya berkisar 47 – 140 jiwa/km2.



Sumber : Provinsi NTT Dalam Angka 2016, BPS Provinsi NTT

Gambar 2.1 Piramida Penduduk NTT

Piramida penduduk NTT menunjukkan ciri khas piramida penduduk negara berkembang (berbentuk *expansive*). Hal ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tinggi (1,65%).

2.2.2. Pendidikan

Profil pendidikan NTT 2016 dilihat dari kemampuan baca - tulis tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 15 tahun (standar SDGs) ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin. Persentase penduduk NTT yang dapat membaca dan menulis huruf latin sebanyak (91,52%) dan yang buta huruf (8,48%). Analisa FSVA NTT (2015) menunjukkan bahwa angka perempuan melek huruf meningkat secara signifikan, dimana angka perempuan buta huruf menurun dari 14,66 persen pada tahun 2009 menjadi 11,31 persen pada tahun 2013. Hal ini berhubungan dengan membaiknya praktek pola pemberian makan dan dampak pada gizi anak.

Jumlah kecamatan yang memiliki perempuan buta huruf lebih dari 20 persen menurun dari 18,21 persen pada tahun 2009 menjadi 10,33 persen pada tahun 2013. Empat kabupaten dengan persentase tertinggi perempuan buta huruf (tahun 2013) adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (23,32 persen), Sumba Barat (22,76 persen), Sumba Tengah (20,82 persen) dan Sabu Raijua (20,38 persen).



Percentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 21,36%. Sementara itu penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah sebanyak 21,12%, terdiri atas 11,20% bersekolah di SD/MI, 5,46% di SLTP/MTs, 3,45% di SMU/SMK dan 1,01% di Akademi/Universitas. Menurut jenis kelamin, terlihat penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (12,55% berbanding 8,27%).

Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi adalah kategori usia 7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun. Sementara pada kelompok umur 19 - 24 tahun, APS terendah. Rincian APS penduduk usia 7 - 24 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Kelompok Umur (tahun)			
	7-12	13-15	16-18	19-24
Laki-laki	98,24	94,60	74,56	26,75
Perempuan	98,35	91,80	73,25	28,92
Rata-rata	98,12	97,50	75,94	24,59

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016

Sebagaimana APS, Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok umur sekolah SD dan SLTP lebih tinggi dibanding APM SMA/SMK dan PT. APM menyatakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. APM SD laki-laki yaitu sebesar (95,24%), perempuan sedikit lebih tinggi (94.51%), APM SLTP laki-laki (66,56%), perempuan lebih tinggi (72.84%), sementara itu APM SMA/SMK adalah (52,87%) jenis kelamin laki-laki dan 56,40% jenis kelamin perempuan.

Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki penduduk merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara mencerminkan semakin tingginya taraf intelektualitas bangsa dan negara tersebut. Di NTT tahun 2016, persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang tidak/belum memiliki ijazah/STTB sebanyak (25,94%). Sedangkan yang sudah memiliki ijazah terdiri atas tamatan SD/MI (55,55%), tamat SLTP/MTs (17,40%), tamat SMU/SMK/PT/sederajat (26,23%).

Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduknya berpendidikan SMU/SMK atau lebih tinggi adalah Kota Kupang (56,41%), Lembata (25,33%) dan Ende (15,77%). Sedangkan yang terendah di Kabupaten Manggarai Timur (9,22%) dan Sumba Barat Daya (12,59%).

Dilihat dari jenis kelamin, lebih banyak perempuan yang tidak berijazah (26,39%) dibandingkan laki-laki (25,46). Untuk pendidikan SD/SMP, perempuan lebih banyak memiliki ijazah (48,63%) dibandingkan laki-laki (46,98%). Tetapi untuk jenjang pendidikan lebih tinggi yakni SMA/PT/sederajat, kepemilikan ijazah laki-laki lebih tinggi dari perempuan (27,55% versus 24,97%). Rincian persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis

kelamin dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2016

Jenis Kelamin	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki		
	Tidak Memiliki	SD/SMP/Sederajat	SMA/PT/Sederajat
Laki-laki	25,46	46,98	27,55
Perempuan	26,39	48,63	24,97
Rata-rata	25,94	47,83	26,23

2.2.3. Kesehatan

Profil Kesehatan di Provinsi NTT digambarkan dalam derajat kesehatan masyarakat (Profil Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2015, Dinas Kesehatan Provinsi NTT). Derajat kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Timur berikut ini disajikan situasi mortalitas, morbilitas, dan status gizi masyarakat.

A. Mortalitas

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematianya pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian. Perkembangan tingkat kematian dan penyakit-penyakit penyebab utama kematian yang terjadi pada periode terakhir akan diuraikan di bawah ini.

Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi NTT masih sangat rendah dibandingkan dengan Nasional. Hal ini terbukti dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Umur Harapan Hidup yang diperoleh dari hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) atau yang dikenal dengan istilah Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan Republik Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali. Gambaran Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.9 Indikator Derajat Kesehatan Tahun 2015

INDIKATOR DERAJAT KESEHATAN	NTT	NASIONAL
AKB/IMR	39/1.000 KH	32/1.000 KH
AKI/MMR	536/100.000 KH	259/100.000 KH
AK BALITA	58/1000 BLT	40/1000 BLT
PREVALENSI GIZI		
- Gizi Buruk	3.357 kasus	
- BGM	3,4%	
- BBLR Gizi Buruk	2.659 kasus	
UHH		
L/P	66,04 THN	70,8 THN

Sumber : BPS Prop NTT 2016 dan Profil Kesehatan Prov. NTT Tahun 2015

Angka Kematian Bayi (AKB) di Proinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan 39/1.000KH, Angka Kematian Ibu (AKB) di Provinsi NTT yang dilaporkan 536/100.000 KH. Jumlah kasus kematian bayi, ibu dan balita pada fasilitas kesehatan yang dilaporkan di Provinsi NTT dari tahun 2015 yaitu sebesar 136 kematian.

Penurunan angka kematian bayi sangat berpengaruh pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UHH) waktu lahir angka kematian bayi sangat peka terhadap perubahan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatnya Umur Harapan Hidup secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Rata-rata angka harapan hidup di NTT pada tahun 2013 adalah 68,05 tahun, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 70,07 tahun. Selain Kota Kupang dengan angka harapan hidup tertinggi, diantara seluruh kabupaten, Kabupaten Sikka memiliki angka harapan hidup tertinggi (69,66 tahun) dan terendah terdapat di Sumba Timur (62,33 tahun).

B. Morbiditas

Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (*community based data*) yang diperoleh melalui studi morbiditas, dan hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta dari sarana pelayanan kesehatan (*facility based data*) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan. Gambaran Pola 10 penyakit terbanyak di Provinsi NTT tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.10 Pola 10 Penyakit Terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2014

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Prosentase
1	ISPA	1,052,656	55.05
2	Penyakit pada sistem otot dan jaringan	207,057	10.83
3	Pengikat/Myalgia	132,854	6.94
4	Penyakit kulit alergi	101,975	5.33
5	Artritis Reumotaid	95,169	4.98
6	Penyakit kulit infeksi	89,206	4.67
7	Diare	68,417	3.58
8	Penyakit lain pada saluran pernapasan bagian atas	66,180	3.46
9	Demam yang sebabnya tidak diketahui	56,975	2.98
10	Penyakit infeksi usus lainnya	41,742	2.18

Sumber : BPS Prop NTT 2016

C. Status Gizi

Status gizi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator, antara lain bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi balita, status gizi wanita usia subur; Kurang Energi Kronis (KEK), Anemia gizi besi pada ibu dan pekerja wanita, dan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), sebagaimana diuraikan berikut ini:

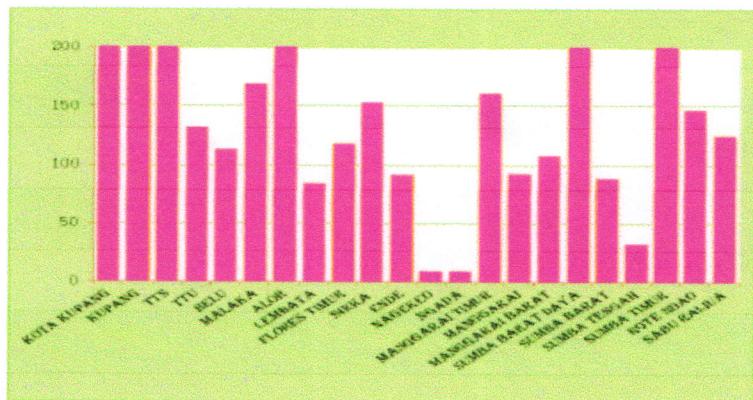
1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian pranatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu: BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) atau BBLR karena *Intrauterine Growth Retardation* (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria, dan penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil.

Sementara itu data BBLR dari kabupaten/kota se - Provinsi NTT pada tahun 2015 memberikan gambaran bahwa persentase bayi lahir hidup dengan BBLR yang ditangani oleh tenaga kesehatan NTT rata-rata 7.6%. Berdasarkan kabupaten/kota, persentase tertinggi ada di Kabupaten Kupang (16,2%), Nagekeo (10,1%) dan TTU (9,4%), sedangkan yang terendah di Kabupaten Alor (0,6%). Kabupaten yang tidak memiliki kasus BBLR adalah Sikka, Ende, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur.

2. Status Gizi Balita

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi Balita adalah dengan anthropometri yang menggunakan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Kategori yang digunakan adalah: gizi lebih (z-score > +2 SD); gizi baik (z-score -2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai -3 SD); gizi buruk (z-score < -3 SD). Dari hasil Pengukuran Status Gizi (PSG) selama tahun 2001-2007, diperoleh gambaran perkembangan status gizi Balita seperti terlihat pada **Gambar 2.2** berikut ini:



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi NTT 2015

Gambar 2.2 Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

Dari laporan hasil pengukuran status gizi diketahui bahwa persentase Balita yang bergizi kurang menurun dari 20,4% di tahun 2007 menjadi 13,0% di tahun 2010. Hal yang sama juga untuk kasus gizi buruk mengalami penurunan dari 9,0% di tahun 2007 menjadi 4,9% di tahun 2010. Kasus gizi buruk tertinggi di kabupaten Sumba Barat Daya (360 kasus), disusul kabupaten Sumba Timur, 317 kasus, sedangkan terendah adalah Ngada dan Nagekeo, masing-masing 9 kasus.

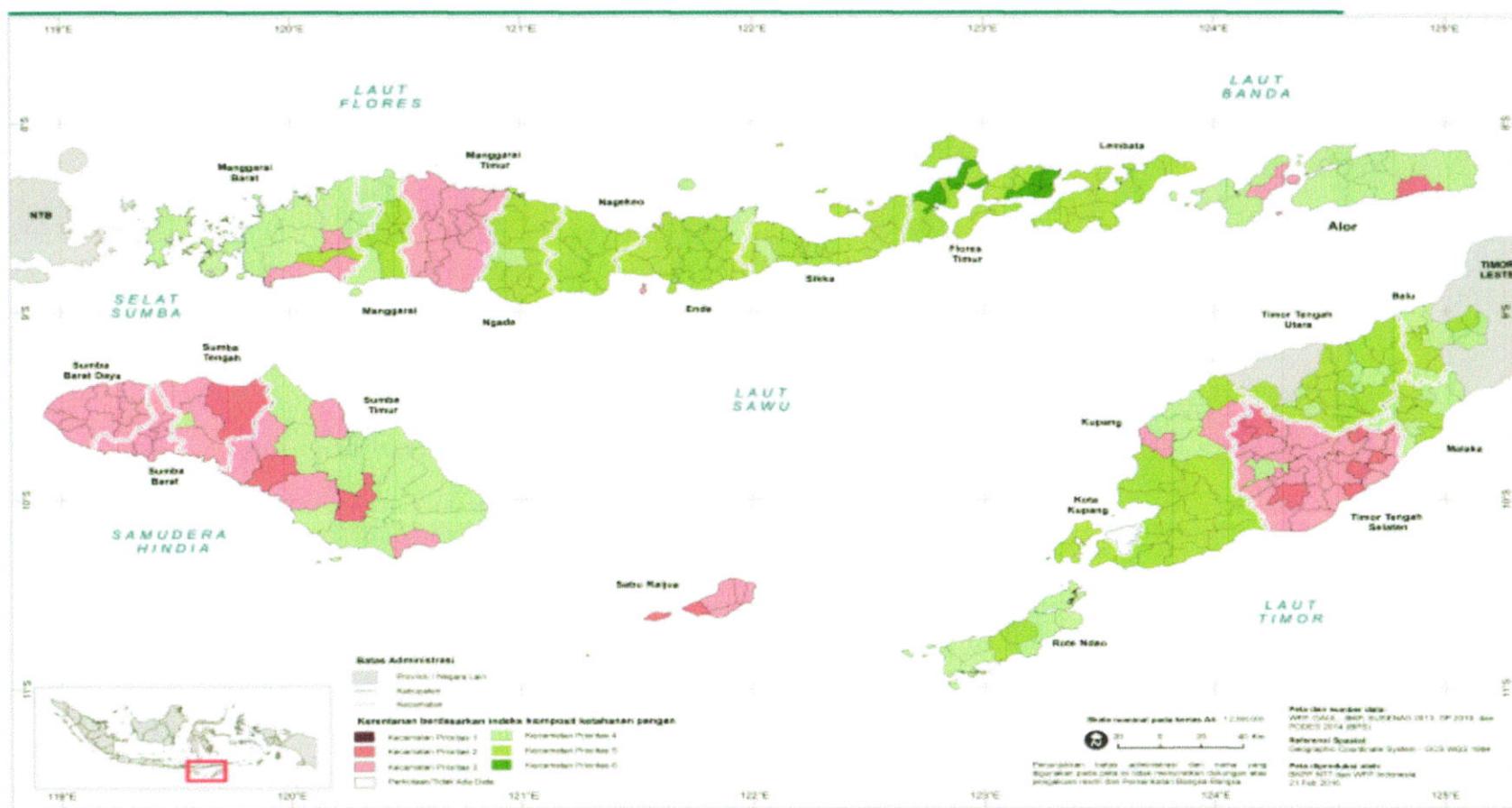
"Menurut RISKESDAS 2013, terdapat 10 kabupaten yang memiliki tingkat prevalensi *underweight* dan *stunting* yang sangat tinggi (Kabupaten Sumba Barat, Kupang, Timor Tengah Selatan, Lembata, Flores Timur, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Sabu Raijua) sedangkan pada tahun 2007 hanya terdapat 12 kabupaten. Kabupaten TTU, Ende dan Belu merupakan tiga kabupaten yang mengalami perubahan status dari prevalensi sangat tinggi menjadi tinggi untuk *underweight* maupun *stunting*. Kabupaten TTS merupakan kabupaten dengan prevalensi tertinggi di NTT baik untuk *underweight* maupun *stunting*." (FSVA NTT, 2015 p.72) Lihat table 2.8 berikut ini.

Tabel 2.11 Presentasi Kurang Gizi Pada Balita Menurut Kabupaten 2013

No	Kabupaten	Berat Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (Underweight)	Tinggi Badan di Bawah Standard Anak (<5 tahun) (Stunting)	Berat Badan Menurut Tinggi Badan Anak <5 tahun di Bawah Standar (Wasting)
1	Sumba Barat	37,73	55,35	9,22
2	Sumba Timur	29,34	51,31	9,74
3	Kupang	33,39	46,22	35,33
4	TTS	46,48	70,43	14,00
5	TTU	29,90	39,94	15,49
6	Belu	29,73	38,57	28,18
7	Alor	29,61	55,66	8,12
8	Lembata	37,90	55,08	15,47
9	Flores Timur	39,72	44,25	22,41
10	Sikka	29,75	41,26	15,42
11	Ende	23,24	35,99	11,78
12	Ngada	26,29	62,14	6,41
13	Manggarai	27,34	58,78	13,72
14	Rote Ndao	41,09	55,38	13,92
15	Manggarai Barat	33,82	49,31	17,36
16	Sumba Barat Daya	33,82	61,22	18,70
17	Sumba Tengah	34,06	63,61	10,86
18	Nagekeo	28,59	44,33	11,38
19	Manggarai Timur	27,40	58,92	14,16
20	Sabu Raijua	39,05	62,49	13,32
21	Malaka")			
22	Kota Kupang	27,31	36,77	14,92
	Total NTT	33,87	51,73	15,44
	Total Indonesia	19,60	37,20	12,10

Sumber: Riskesdas Kemenkes 2013

Salah satu penyebab kekurangan gizi adalah kerawanan pangan yang sering terjadi di provinsi NTT. Gambaran ketahanan dan kerawanan pangan dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:



Sumber: FSVA NTT 2015

Gambar 2.3 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTT 2015

FSVA NTT 2015 menjelaskan bahwa kecamatan-kecamatan dikelompokkan berdasarkan pencapaian terhadap 9 indikator yang meliputi ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, menjadi enam kelompok prioritas yang mencerminkan kondisi situasi ketahanan pangan dan gizinya yaitu dari kelompok yang paling rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi (Prioritas 1) sampai dengan kelompok yang relatif tahan pangan dan gizi (Prioritas 6).

- ✓ Kondisi ketahanan pangan dan gizi telah meningkat dibandingkan dengan FSVA NTT 2010. Pada FSVA NTT 2015 tidak ditemukan kecamatan dengan Prioritas penanganan I, sedangkan pada FSVA NTT 2010 yang lalu ditemukan 38 kecamatan berada pada Prioritas penanganan I.
- ✓ Pada FSVA NTT 2015, terdapat 81 kecamatan yang memiliki kondisi rentan (Prioritas 1-3), yang menggambarkan 27 persen dari 300 kecamatan di Provinsi NTT. Angka ini telah menurun dari kondisi tahun 2010 yang lalu dimana terdapat 135 kecamatan (47 persen) pada kelompok prioritas ini.
- ✓ Sementara kecamatan-kecamatan yang digambarkan pada kondisi tahan pangan (prioritas penanganan 4-6) pada FSVA NTT 2015 berjumlah 219 kecamatan (73 persen) dan lebih banyak dibandingkan dengan FSVA 2010 yang lalu yaitu sejumlah 145 kecamatan (52 persen).

2.2.4. Disabilitas

Penyandang disabilitas di NTT mencapai 38.650 orang. Kecacatan yang dialami adalah bicara, eks psikotik, kelainan bentuk tubuh, *light perception, low vision*, mental detardasi, cacat ganda, rungu, cacat kaki, dan penggunaan lengan dan jari. Penyandang disabilitas terbesar adalah laki-laki (21,904 jiwa), sedangkan perempuan sebanyak 16,746 jiwa. Kabupaten dengan jumlah tertinggi adalah TTS (3.847 orang), diikuti Manggarai, Flores Timur dan Sikka masing-masing di atas angka 3.000 orang. Sedangkan terendah adalah Kota Kupang (512 orang). Jumlah penyandang disabilitas per kabupaten dapat dilihat di table 2.9.

Tabel 2.12 Jumlah Penyandang Disabilitas per Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN	TOTAL	
		L	P
1	ALOR	1,388	1,021
2	BELU	1,419	1,125
3	ENDE	934	755
4	FLORES TIMUR	1,721	1,482
5	KUPANG	1,654	1,144
6	LEMBATA	862	817
7	MALAKA*		
8	MANGGARAI	2,045	1,616
9	MANGGARAI BARAT	847	536
10	MANGGARAI TIMUR	1,090	823
11	NAGEKEO	881	770

12	NGADA	623	644
13	ROTE NDAO	793	605
14	SIKKA	1,696	1,428
15	SUMBA BARAT	601	414
16	SUMBA BARAT DAYA	774	460
17	SUMBA TENGAH	435	259
18	SUMBA TIMUR	534	295
19	TIMOR TENGAH SELATAN	2,246	1,601
20	TIMOR TENGAH UTARA	1,044	756
21	KOTA KUPANG	317	195
NUSA TENGGARA TIMUR		21,904	16,746

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT (Sensus 2008).

*): Bergabung dengan kabupaten induk

2.2.5. Kemiskinan

Bappeda Provinsi NTT merilis bahwa “jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang (22,19 persen) mengalami penurunan sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah 1.160,53 ribu orang (22,58 persen).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode September 2015 - Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 25,57 ribu orang (dari 1.063,47 ribu orang menjadi 1.037,90 ribu orang) sedangkan untuk perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 14,96 ribu orang (dari 97,06 ribu orang naik menjadi 112,02 ribu orang).

Periode September 2015 – Maret 2016, Garis Kemiskinan (GK) naik sebesar 5,12 persen, yaitu dari Rp 307.224,- per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp 322.947,- per kapita per bulan pada Maret 2016.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2015 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 79,80 persen, dan pada Maret 2016 sebesar 79,35 persen.

Pada periode September 2015 - Maret 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 4,619 pada September 2015 menjadi 4,686 pada Maret 2016. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 1,437 menjadi 1,295 pada periode yang sama.



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

8010

8011

8012

8013

8014

8015

8016

8017

8018

8019

8020

8021

8022

8023

8024

8025

8026

8027

8028

8029

8030

8031

8032

8033

8034

8035

8036

8037

8038

8039

8040

8041

8042

8043

8044

8045

8046

8047

8048

8049

8050

8051

8052

8053

8054

8055

8056

8057

8058

8059

8060

8061

8062

8063

8064

8065

8066

8067

8068

8069

8070

8071

8072

8073

8074

8075

8076

8077

8078

8079

8080

8081

8082

8083

8084

8085

8086

8087

8088

8089

8090

8091

8092

8093

8094

8095

8096

8097

8098

8099

80100

80101

80102

80103

80104

80105

80106

80107

80108

80109

80110

80111

80112

80113

80114

80115

80116

80117

80118

80119

80120

80121

80122

80123

80124

80125

80126

80127

80128

80129

80130

80131

80132

80133

80134

80135

80136

80137

80138

80139

80140

80141

80142

80143

80144

80145

80146

80147

80148

80149

80150

80151

80152

80153

80154

80155

80156

80157

80158

80159

80160

80161

80162

80163

80164

80165

80166

80167

80168

80169

80170

80171

80172

80173

80174

80175

80176

80177

80178

80179

80180

80181

80182

80183

80184

80185

80186

80187

80188

80189

80190

80191

80192

80193

80194

80195

80196

80197

80198

80199

80200

80201

80202

80203

80204

80205

80206

80207

80208

80209

80210

80211

80212

80213

80214

80215

80216

80217

80218

80219

80220

80221

80222

80223

80224

80225

80226

80227

80228

80229

80230

80231

80232

80233

80234

80235

80236

80237

80238

80239

80240

80241

80242

80243

80244

80245

80246

80247

80248

80249

80250

80251

80252

80253

80254

80255

80256

80257

80258

80259

80260

80261

80262

80263

80264

80265

80266

80267

80268

80269

80270

80271

80272

80273

80274

80275

80276

80277

80278

80279

80280

80281

80282

80283

80284

80285

80286

80287

80288

80289

80290

80291

80292

80293

80294

80295

80296

80297

80298

80299

80300

80301

80302

80303

80304

80305

80306

80307

80308

80309

80310

80311

80312

80313

80314

80315

80316

80317

80318

80319

80320

80321

80322

80323

80324

80325

80326

80327

80328

80329

80330

80331

80332

80333

80334

80335

80336

80337

80338

80339

80340

80341

80342

80343

80344

80345

80346

80347

80348

80349

80350

80351

80352

80353

80354

80355

80356

80357

80358

80359

80360

80361

80362

80363

80364

80365

80366

80367

80368

80369

80370

80371

80372

80373

80374

80375

80376

80377

80378

80379

80380

80381

80382

80383

80384

80385

80386

80387

80388

80389

80390

80391

80392

80393

80394

80395

80396

80397

80398

80399

80400

80401

80402

80403

80404

80405

80406

80407

80408

80409

80410

80411

80412

80413

80414

80415

80416

80417

80418

80419

80420

80421

80422

80423

80424

80425

80426

80427

80428

80429

80430

80

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTT Tahun 2010-2015

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Prosentase
2010	193,298	1,021,600	21.76
2011	198,553	986,500	20.48
2012	222,507	1,000,290	20.41
2013	251,080	1,006,880	20.24
2014	268,536	991,880	19.60
2015	307,224	1,160,530	22.58

Sumber: Provinsi NTT dalam Angka 2016, BPS Provinsi NTT

2.3. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NTT

Dengan mengacu kepada visi dan misi penanggulangan bencana NTT, maka dapat diformulasikan kebijakan penanggulangan bencana NTT. Kebijakan penanggulangan bencana ini disusun atas dasar regulasi nasional, regulasi daerah, kelembagaan daerah dan perencanaan.

2.3.1. Legislasi

Regulasi yang menjadi dasar penanggulangan bencana di Provinsi NTT adalah:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil-Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
5. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI no 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan no 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB.
12. Kepmenkes no 145 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bencana Bidang Kesehatan.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025
15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT
16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT 2010-2030

2.3.2. Kelembagaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi NTT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 tahun 2009. Organisasi Pemerintah Daerah ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan OPD, lembaga dan OPD terkait. Selain itu BPBD juga di dukung oleh organisasi – organisasi yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) , Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) , Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Tematik lainnya.

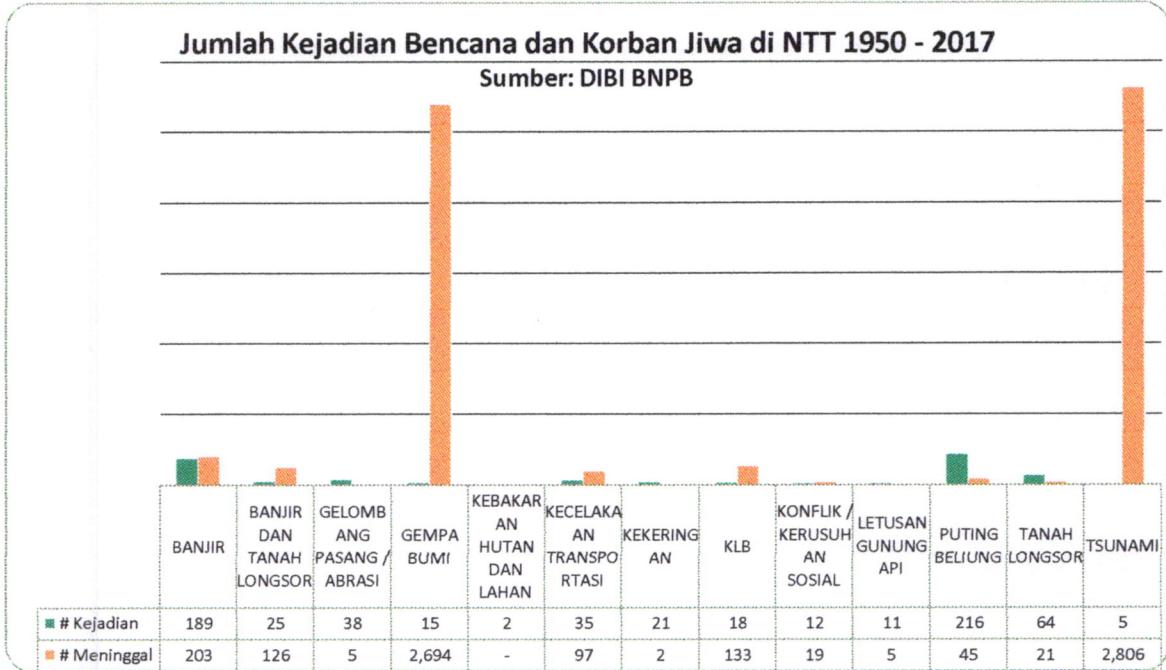
2.4. SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan catatan kejadian bencana yang telah terjadi (dibi.nttprov.go.id) seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT telah mengalami kejadian bencana.

Jika menilik tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; hasil identifikasi menunjukkan bahwa bencana yang telah terjadi di Provinsi NTT terdiri dari 11 jenis bencana. Tetapi dalam kajian risiko bencana yang menjadi dasar RPB, jenis bencana ANGIN PUTING BELIUNG tidak dikaji lebih jauh. Dengan demikian maka pembahasan tentang sejarah bencana dan rencana penanggulangan disesuaikan dengan pembahasan di kajian, yakni tentang 10 jenis bencana, yaitu:

1. CUACA EKSTRIM, khususnya gelombang pasang dan abrasi
2. GEMPA BUMI
3. TSUNAMI
4. LETUSAN GUNUNG API
5. TANAH LONGSOR
6. BANJIR
7. KEKERINGAN
8. KEJADIAN LUAR BIASA WABAH PENYAKIT
9. KEGAGALAN TEKNOLOGI, khususnya kebakaran hutan dan lahan
10. KONFLIK SOSIAL

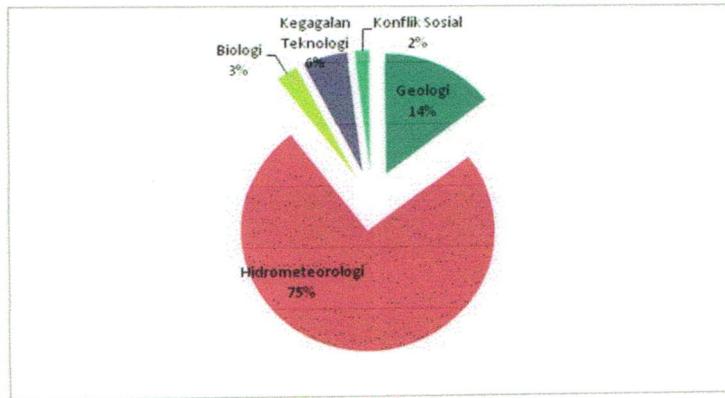
Jumlah kejadian dan korban jiwa akibat bencana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1950 hingga pertengahan 2017 dapat di lihat pada gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.4 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Jiwa akibat Bencana di Prop. NTT periode 1950 - 2017

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa jumlah korban jiwa terbanyak adalah akibat kejadian gempa bumi dan tsunami, masing-masing 2,694 jiwa dari 15 kejadian dan 2,806 jiwa dari 5 kejadian. Sedangkan banjir memakan korban 203 jiwa dari 189 kejadian, diikuti KLB yaitu 133 jiwa dari 18 kejadian. Dari 25 kejadian banjir disertai tanah longsor, terdapat 126 korban jiwa. Kecelakaan transportasi menelan 97 korban jiwa dari 35 kejadian.

Untuk pembahasan pada bagian selanjutnya, 11 jenis bencana tersebut akan digolongkan ke dalam 5 kategori bencana, yaitu geologi, hidrometeorologi, biologi, kegagalan teknologi dan sosial.



Sumber: Pengolahan data dari DIBI BNPB

Gambar 2.5 Prosentase Kejadian Bencana berdasarkan 5 kategori di Prop. NTT periode 1950 – 2017

Gambar 2.5. menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi mendominasi (75%) kejadian bencana di NTT. Sedangkan bencana geologi 14%, disusul kegagalan teknologi 6%. Bencana biologi dan konflik social masing-masing 3% dan 2%.

2.4.1. Geologi

A. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana geologi yang dapat diidentifikasi telah terjadi di kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT. Adanya pertemuan antara lempeng tektonik Euro Asia dan Austro India, diketahui telah berdampak pada peningkatan potensi gempa yang dapat menimbulkan tsunami di kawasan barat laut dan selatan Provinsi NTT. Berdasarkan data historis bencana yang diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 15 kali gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa dan material telah terjadi di wilayah Provinsi NTT sejak 1950 hingga 2017; antara lain di Alor (tahun 1987,1991,2004,2005, 2016, 2017), Flores Timur (1982,1992,2003), Kupang (2009), Manggarai (2003), Manggarai Barat, Timor Tengah Utara (2010), Sumba Barat, dan Sumba Timur.

Kejadian gempa tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup tinggi di masyarakat, yang bersumber tidak hanya dari kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga luka-luka dan korban jiwa. Bencana gempa bumi dengan dampak terbesar tercatat terjadi pada tahun 1992 terjadi gempa bumi 6,8 SR yang disertai gelombang tsunami di Sikka dan Flores Timur dengan korban meninggal 2500 jiwa dan 2103 orang luka-luka. Untuk gempa bumi yang tidak disertai tsunami dan berdampak paling besar tercatat pada tahun 2004 terjadi gempa bumi 6,5 SR di Alor yang mengakibatkan kehilangan 33 jiwa, 310 orang luka-luka, 10.546 rumah rusak berat dan 5.505 rumah rusak ringan. Total dampak dari gempa bumi yang telah terjadi adalah 2.694 jiwa meninggal, 2.990 orang luka-luka, 94 orang hilang, 10.556 rumah rusak berat, 5.507 rumah rusak ringan.

B. Tsunami

Bencana Tsunami merupakan salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi di Provinsi NTT. Tercatat telah 5 kali tsunami menghantam pantai utara Pulau Flores. 3 kali di Kab. Sikka (1973,1977,1991,1992) dan 1 kali di Kab. Flores Timur (1979). Bencana tsunami terbesar terjadi pada tahun 1992 di Sikka yang menimbulkan korban 2400 jiwa melayang dan 18000 rumah rusak berat. Total dampak yang ditimbulkan akibat bencana tsunami adalah 2.806 orang meninggal, 2.864 hilang, dan 18.000 rumah rusak berat.

Selain yang tercatat dalam DIBI, NTT juga pernah mengalami bencana tsunami yang disebabkan oleh aktivitas longsor vulkanik di Lembata. Kejadian ini tidak banyak digunakan dalam pembahasan – pembahasan bencana di tingkat Provinsi maupun Nasional, namun berdampak besar bagi masyarakat Lembata. Sebanyak 500 – 700 orang meninggal dan satu wilayah kecamatan amblas.

Kotak 1 Tsunami Lembata1979

Tsunami Lembata akibat peristiwa longsor gunung api terjadi pada tanggal 18 July 1979. Laporan tinjauan secara teknis pertama mungkin yang ditulis oleh Elifas (1979) merupakan tulisan berbahasa Indonesia yang relatif awal dalam merekam peristiwa tsunami yang dipicu kegiatan vulkanik tersebut. Studi yang lebih detail berkaitan dengan analisis kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang detail bisa dibaca pada tulisan Jeffery (1981).

Dilaporkan oleh Elifas (1979) bahwa daerah yang mengalami bencana tersebut adalah lebih kurang 50 km sepanjang Teluk Labala di bagian barat hingga Teluk Waiteba di bagian timur (Lihat Gambar 2 dan 3) Sedangkan Tanjung atau Semenanjung Atadei tepatnya ibarat kaki depan dari pulau Lembata berbentuk dinosaurus ini.

Tsunami Lembata atau Lomblen 1979 berdampak pada meninggalnya ratusan orang menurut versi Kompas 21 Juli 1979. Sedangkan International Herald Tribune 23 Juli 1979 melaporkan bahwa 700 orang meninggal akibat dihantam tsunami dan sebagian terkubur akibat tertimbun longsoran di empat desa. Laporan International Herald Tribune sehari kemudian direvisi mengikuti keterangan Gubernur Ben Mboi menjadi 539 meninggal dan 364 hilang (Lihat Jeffery 1981:1). Laporan Elifas (1979:4) menyebutkan total 84 orang meninggal dan 322 orang hilang, dan 470 orang menderita.3 Dokumen Grand Skenario Indonesian Tsunami Early Warning System 2006 menyebutkan angka 550 orang meninggal.

Dikutip dari Lassa, J.A., 2009, Bencana Yang Terlupakan? Mengingat Kembali Bencana Larantuka dan Lembata 1979-2009, Journal of NTT Studies 1 (2) (2009) 159-184. ISSN: 20856504

C. Letusan Gunung Api

Aktivitas Gunung berapi Anak Ranakah di Kab. Manggarai yang berstatus siaga serta Gunung Lewotobi Laki-laki dan Lewotobi Perempuan di Kab. Flores Timur yang masih berstatus waspada menyebabkan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur berpotensi tinggi terkena dampak dari letusan gunung api, termasuk banjir lava/lahar. Ancaman juga terkait keberadaan gunung berapi aktif lainnya di NTT yang aktivitasnya dapat meningkat sewaktu-waktu, yakni Gn. Egon, Gn. Iya, Gn. Rokatenda, Gn. Kelimutu, Gn. Ebolobo, Gn. Inelika, Gn. Palue, Gn. Illeboleng, Gn. Lewotolo, Gn. Serung, Gn. Iliwerung. Gunung-gunung tersebut tersebar di Pulau Flores, Lembata, dan Kep. Alor.

Data historis yang tercatat di DIBI dari tahun 1973 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa letusan gunung api telah terjadi sebanyak 11 kali di Provinsi NTT; antara lain di wilayah Flores Timur, Lembata, dan Sikka. Dampak terbesar yang dialami oleh masyarakat akibat bencana letusan gunung api di NTT adalah saat letusan Gunung Egon di Sikka pada tahun 2004 dimana 5.584 orang dievakuasi.

D. Longsor

Kejadian bencana geologi lain yang dapat teridentifikasi di NTT adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan menuruni atau keluar lereng sebagai akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Bencana tanah longsor di wilayah NTT diketahui pernah terjadi di kabupaten-



kabupaten berikut: Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, Kupang, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sikka.

Salah satu bencana tanah longsor yang memiliki dampak cukup tinggi bagi masyarakat sekitar adalah peristiwa yang terjadi di Timor Tengah Selatan (TTS) pada tahun 2008. Bencana terjadi 2 kali dalam rentang waktu 3 hari. Bencana tersebut menyebabkan 47 rumah rusak berat dan 2 hari berikutnya longsor kembali terjadi dan menyebabkan 48 rumah rusak berat serta 31 rumah rusak berat. Longsor tersebut juga menyebabkan 3 km jalan rusak berat. Kejadian longsor yang juga menyebabkan dampak yang cukup besar terjadi di Sikka pada tahun 2006 yang menyebabkan 56 rumah rusak berat.

2.4.2. Hidrometeorologi

A. Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak dapat tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan/atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Banjir adalah salah satu bencana hidrometeorologi yang disinyalir tidak lagi menjadi suatu peristiwa yang asing bagi wilayah NTT. Kondisi fisiografis Provinsi NTT yang dilalui oleh sungai-sungai besar telah berkontribusi pada tingginya resiko bencana banjir di wilayah ini, termasuk banjir yang diiringi oleh tanah longsor.

Beberapa daerah yang pernah dilanda banjir di NTT antara lain: Kabupaten Alor, Belu, Malaka, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, Kupang, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sikka. Di Kab. Kupang dan Kab. Malaka banjir merupakan kejadian yang berulang setiap tahun. Sementara itu, banjir yang disertai tanah longsor tercatat pernah terjadi di Kabupaten Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan Sikka.

Berdasarkan data historis bencana dari DIBI, kerugian yang dialami masyarakat akibat terjadinya bencana banjir di wilayah NTT cukup besar. Kabupaten yang cukup sering terjadi banjir dan menimbulkan banyak korban terjadi di Kab. Malaka dan Flores Timur. Pada tahun 2006 sebanyak 307 orang luka-luka dan 1077 orang harus mengungsi, tahun berikutnya 656 orang luka-luka dan 90 rumah rusak berat, setahun kemudian 1500 orang luka-luka, sekitar 8000 orang dievakuasi, 191 rumah rusak berat, dan 2733 rumah rusak berat.

Sedangkan di Flores Timur, banjir yang cukup besar terjadi pada tahun 1979 dan tahun 2003. Pada tahun 1979, 97 orang meninggal, 350 luka-luka, 47 hilang. Sedangkan pada tahun 2003, 10 orang meninggal, 75 orang luka-luka, 2 hilang, dan 402 rumah rusak berat.

Untuk banjir yang disertai tanah longsor, kerugian yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2007 di Manggarai menyebabkan 43 orang meninggal, 32 luka-luka, 26 hilang, dan 5818 orang



harus mengungsi. Kondisi yang sejenis terjadi pada tahun 2003 di Kabupaten Ende. Bencana ini terjadi 2 kali dalam waktu 4 hari, telah menelan korban jiwa sebanyak 41 orang meninggal, 16 luka-luka, dan 38 hilang. Bencana di Flores Timur pada tahun dan bulan yang sama dengan kejadian di Kab. Ende juga terjadi 2 kali dalam 3 hari. Bencana tersebut menelan korban jiwa 22 orang, 62 luka-luka, dan 19 orang hilang.

B. Kekeringan

Provinsi NTT juga diketahui memiliki potensi tinggi dilanda kekeringan. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kerawanan pangan. Tercatat 6 kabupaten/kota di NTT pernah mengalami kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan, antara lain: Ngada, Ende, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan.

Data historis menunjukkan dampak utama dari bencana ini adalah rusaknya lahan pertanian masyarakat yang kemudian mengakibatkan terjadinya gagal panen. Kabupaten yang pernah mengalami kerugian cukup besar adalah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 kemarin 16.485 Ha lahan mengalami kerusakan, 172.000 orang merasakan masa kekeringan yang cukup berat dan 2 orang diantaranya meninggal dunia. Pada tahun 2015, semua kabupaten/kota di NTT mengalami kekeringan kecuali Kota Kupang dan Malaka. Kekeringan tersebut merupakan dampak dari El nino yang menurunkan debit air baku sebesar 50 persen.

C. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis dan merupakan salah satu penyebab abrasi yang terjadi dengan cepat. Gelombang ekstrim berbentuk gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan, maupun di darat terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang ekstrim terjadi karena adanya angin kencang, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Terjadinya gelombang ekstrim dapat membahayakan kapal-kapal yang sedang melaut dan juga dapat menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai (abrasi).

Untuk wilayah Provinsi NTT, data historis yang terekam di DIBI menunjukkan bahwa pada tahun 1928 pernah terjadi gelombang ekstrim yang cukup besar di Flores Timur menyebabkan 128 orang meninggal dunia. Bencana akibat gelombang ekstrim juga terjadi di Kabupaten Alor, Ende, Kota Kupang, Lembata, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara. Berdasarkan data DIBI, gelombang pasang yang menimbulkan kerugian cukup parah terjadi di Kab Sikka pada bulan Februari tahun 2008 mengakibatkan 657 rumah rusak berat dengan kerugian mencapai 10 Milyar Rupiah.

2.4.3. Biologi (Epidemi dan Wabah Penyakit)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, epidemi dan wabah penyakit merupakan salah jenis bencana yang masuk dalam kategori bencana biologi. Epidemi diartikan sebagai wabah penyakit yang terjadi dalam tempo yang lebih cepat dibandingkan

dengan yang diduga. Di dalam dokumen ini yang termasuk dalam kategori epidemi dan wabah penyakit adalah penyakit menular (misal: HIV, campak, malaria, diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut/ISPA dan demam berdarah) yang termasuk dalam kejadian luar biasa di masing-masing wilayah.

Kejadian luar biasa (KLB) berupa wabah penyakit tercatat telah terjadi beberapa kali di wilayah Provinsi NTT. Pada tahun 2005, wabah penyakit malaria di Kabupaten Sumba Barat tercatat menyerang sekurangnya 2772 orang dan mengakibatkan 22 diantaranya meninggal dunia. Wabah penyakit yang menimbulkan korban jiwa cukup banyak juga adalah wabah DBD yang pada tahun 2002 yang menyebabkan 17 orang meninggal di Belu dan 12 orang meninggal di Kab. Kupang.

2.4.4. Kegagalan Teknologi: kebakaran hutan dan lahan

Kegagalan teknologi merupakan bencana salah satu bencana non-alam yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007. Bencana ini bermuara pada “man-made hazard” yang berarti bencana akibat kelalaian manusia yang tidak dapat mengontrol ciptaannya sendiri yaitu teknologi. Implementasi kegagalan tersebut dapat terjadi di wilayah alami seperti hutan (misalnya kebakaran hutan dan lahan) maupun wilayah buatan seperti permukiman dan areal industri. Sebagai dampaknya, kegagalan teknologi dapat menyebabkan terjadinya pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya.

Data historis menunjukkan keempat tipe kegagalan teknologi yang dikategorikan sebagai bencana yang pernah terjadi di Provinsi NTT hanya 3. Belum pernah tercatat kejadian kecelakaan industri. Untuk kecelakaan transportasi, korban terbesar terjadi pada kecelakaan kapal laut di perairan Kabupaten Kupang pada bulan Januari tahun 2006. Kecelakaan tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 36 orang, 123 luka-luka dan 85 hilang.

Untuk peristiwa kebakaran hutan dan lahan tercatat terjadi 1 kali di Lembata pada tahun 2008. Sementara untuk kebakaran pemukiman dan bangunan lainnya, DIBI mencatat 62 kebakaran telah terjadi di Provinsi NTT pada periode waktu tahun 1998-2010. Jumlah korban terbanyak terjadi pada peristiwa kebakaran di Kab. Ngada pada tahun 1999 yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan 168 rumah rusak berat.

2.4.5. Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan jenis lain bencana non-alam yang tercantum di dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2007. Sejalan dengan karakteristik penduduk Indonesia yang beragam, penduduk yang menempati wilayah NTT memiliki kemajemukan yang cukup tinggi sehingga ada potensi terjadinya konflik sosial. Berdasarkan data dari Biro Kesra, Kantor Gubernur, Depkes, dan BPBD yang terekam di DIBI, tercatat 9 kali kerusuhan sosial pernah terjadi di

NTT. Konflik sosial pernah terjadi di Kota Kupang, Manggarai, Sikka, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara.

Konflik sosial dengan korban paling banyak terjadi pada tahun 2004 di Kab. Manggarai. Konflik yang terjadi antara petani kopi di Colol, Kec. Ranaka dengan pihak kepolisian mengakibatkan 4 orang tewas dan 47 orang luka-luka.

BAB 3 PENILAIAN RISIKO BENCANA

Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti halnya daerah lain di Indonesia, merupakan wilayah yang rawan bencana; baik yang berupa bencana alam maupun bencana sosial. Berdasarkan catatan BPBD Provinsi NTT, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT telah mengalami kejadian bencana.

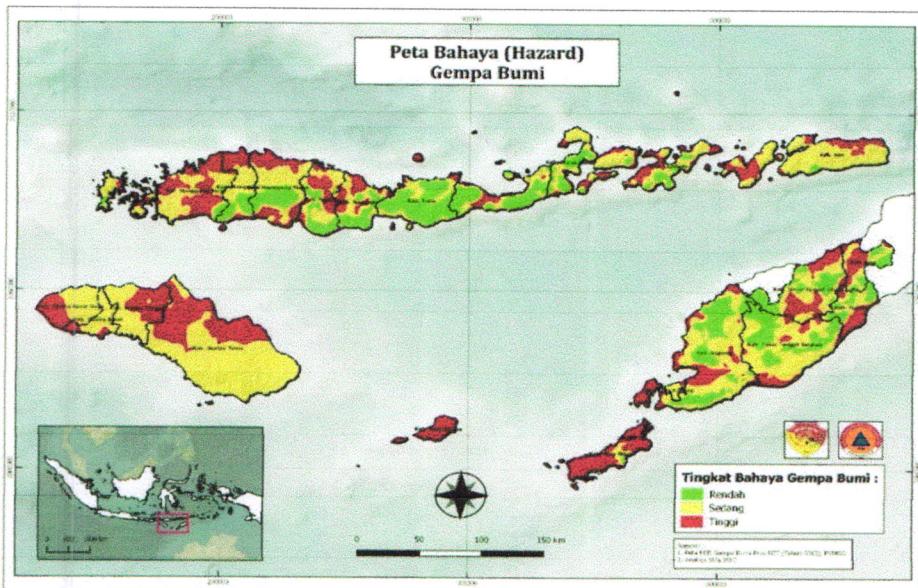
Bagian ini akan menyajikan hasil kajian risiko terhadap 11 jenis bencana yang terjadi di NTT, yakni gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir (termasuk yang disertai tanah longsor), kekeringan, angin topan, gelombang ekstrim/cuaca ekstrim/abrasi, Epidemi/KLB dan konflik sosial.

Hasil kajian akan dibagi menjadi tiga bagian, yakni kajian ancaman, kajian kerentanan dan kajian risiko yang merupakan kombinasi dari kajian ancaman dan kerentanan. Sementara itu ada bagian kajian kapasitas yang secara khusus menilai kapasitas institusi atau kelembagaan pihak – pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kajian ini dipaparkan dengan mengacu pada Prioritas Nasional dalam Rencana PB Nasional 2017.

3.1. ANCAMAN

3.1.1. Geologi

A. Gempa Bumi



Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Gambar 3.1 Peta Ancaman Gempa Bumi di NTT

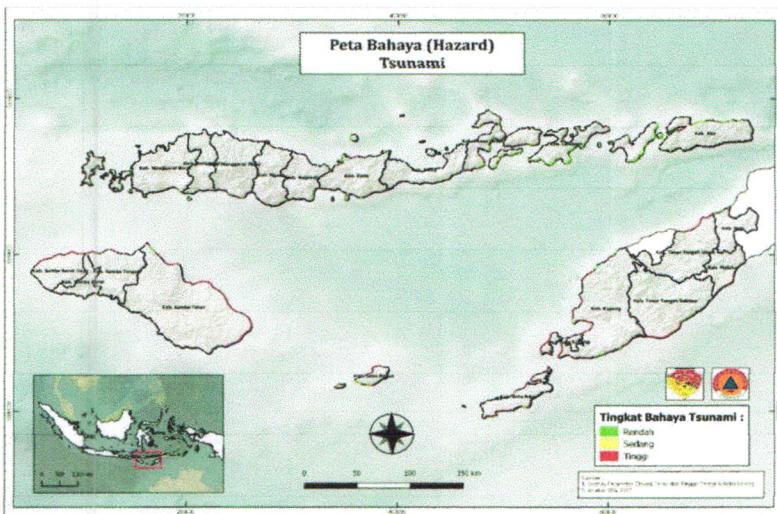
Hasil pemetaan ancaman gempa bumi untuk Provinsi NTT tersaji pada **Gambar 3.1** di atas. Wilayah utara Pulau Flores bagian timur, wilayah utara Pulau Lembata, wilayah barat dan selatan Pulau Sumba, Pulau Sabu, Pulau Rote, wilayah selatan Pulau Timor dan wilayah utara Pulau Alor memiliki ancaman yang **tinggi**; tingkat ancaman **rendah** berada di wilayah selatan Pulau Flores, wilayah barat Pulau Sumba dan tenggara Pulau Timor. Peta tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah NTT memiliki tingkat ancaman **sedang** untuk bencana gempa bumi. Lebih lanjut dipaparkan dalam **Tabel 3.1**. berikut:

Tabel 3.1 Wilayah dengan Ancaman Gempa Bumi Tinggi

No	WILAYAH
1	Wilayah utara Pulau Flores (Toriang Mbai, Saramba, P. Babi, Adonara, Lewotolo)
2	Wilayah utara Pulau Lembata (Balauring, Wairiang)
3	Wilayah utara Pulau Alor (Kokar, Kalabahi, Bukapitung)
4	Wilayah barat Pulau Sumba (Tambolaka, Waikabubak)
5	Wilayah selatan Pulau Timor
6	Pulau Rote dan Pulau Sabu

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011 dan Peta Ancaman Gempa Bumi di NTT 2017.

B. Tsunami



Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Gambar 3.2 Peta Wilayah Tsunami di NTT

Hasil pemetaan yang tersaji pada **Gambar 3.2** serta hasil identifikasi karakteristik dan historis kejadian bencana tsunami di NTT menunjukkan bahwa beberapa wilayah pesisir yang memiliki ancaman **cukup tinggi** seperti pesisir selatan P.Timor, Pesisir Selatan P. Rote, Pesisir Selatan P. Sumba, Pesisir Utara P. Flores, Pesisir Kep. Alor, dan Pesisir Utara P. Lembata. Namun secara umum tingkat ancaman tsunami di wilayah ini adalah **sedang**. Selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

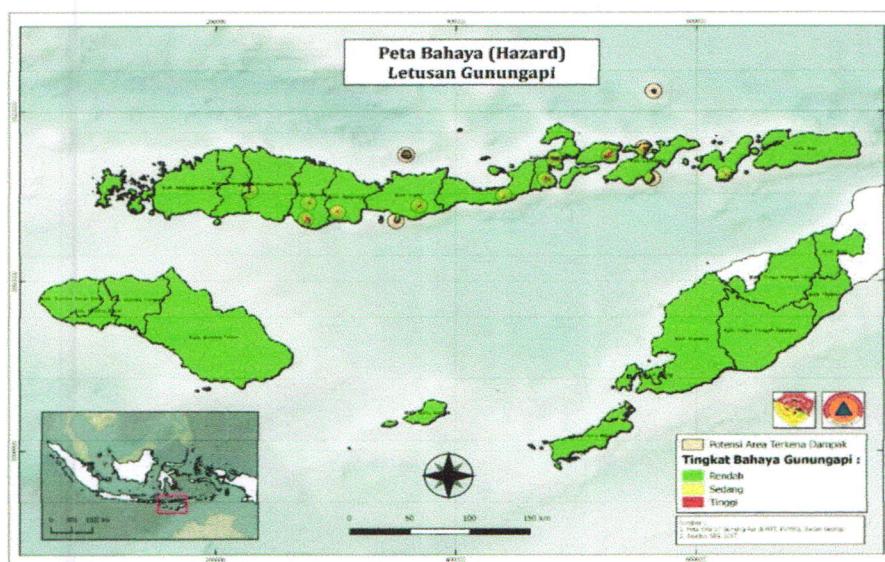
Tabel 3.2 Wilayah Ancaman Tinggi Tsunami

No	Wilayah dengan Ancaman Tsunami TINGGI
1	Pesisir selatan Pulau Timor (Tablolong, Nisum, Toineke, Kolbano, Boking, Besikama)
2	Pesisir selatan Pulau Rote (Manuk, Landu, Eahun dan Oeulu)
3	Pesisir selatan Pulau Sumba (Manukangga, Nggonggi, Praigoga, Wanokaka)
4	Pesisir utara Pulau Flores (Toriang Mbai, Saramba, P. Babi, Adonara, Lewotolo)
5	Pesisir Kepulauan Alor (Batulolong, Maritang, Pantar, Matang)
6	Pesisir utara Pulau Lembata (Balauring, Wairiang)

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

C. Letusan Gunung Api

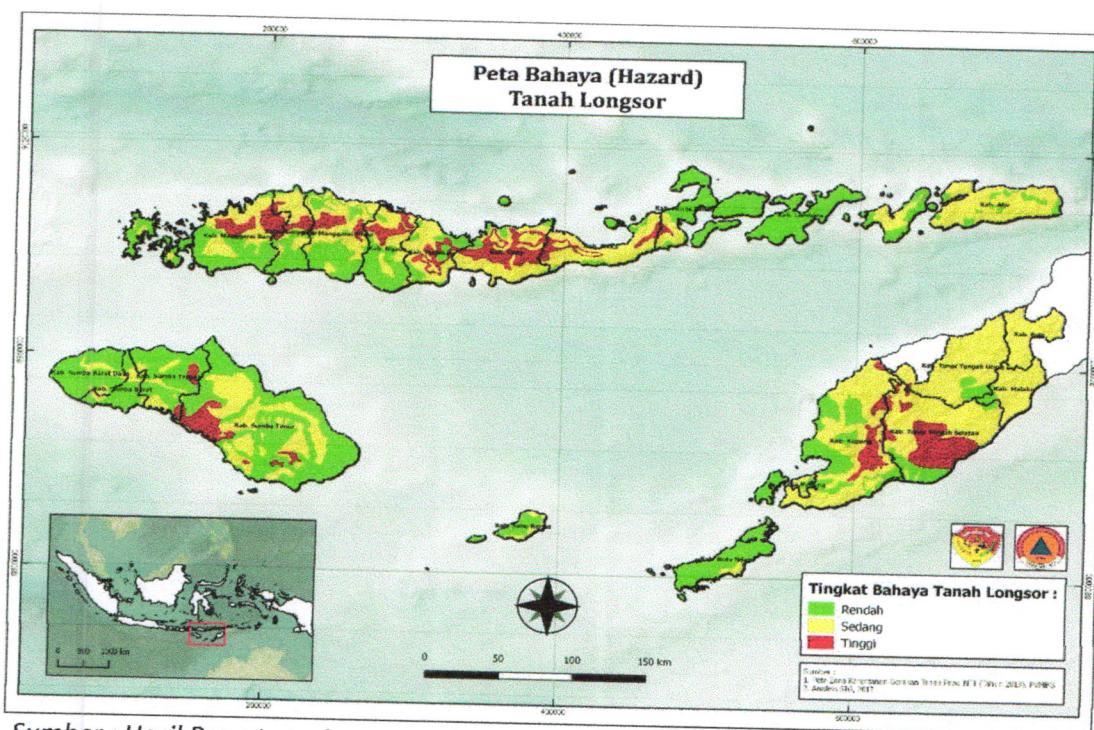
Peta ancaman letusan gunung api di wilayah NTT yang tersaji pada **Gambar 3.3** menunjukkan bahwa tingkat ancaman tinggi bencana gunung api di NTT terletak di Kab. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.



Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Gambar 3.3 Peta Wilayah Gunung Api di NTT

D. Tanah Longsor



Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Gambar 3.4 Peta Wilayah Tanah Longsor di NTT

Ancaman untuk tanah longsor di Provinsi NTT memiliki tingkatan yang bervariasi di setiap pulau, seperti digambarkan pada **Gambar 3.4**. Ancaman tanah longsor dengan tingkat tinggi mendominasi di Pulau Flores, dan terdapat di Pulau Timor dan Pulau Sumba. Sedangkan ancaman rendah mendominasi Pulau Sumba, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Ancaman tingkat sedang mendominasi Pulau Timor, Pulau Lembata, dan Pulau Alor. **Tabel 3.3** menunjukkan wilayah dengan tingkat ancaman tinggi dan sedang untuk longsor:

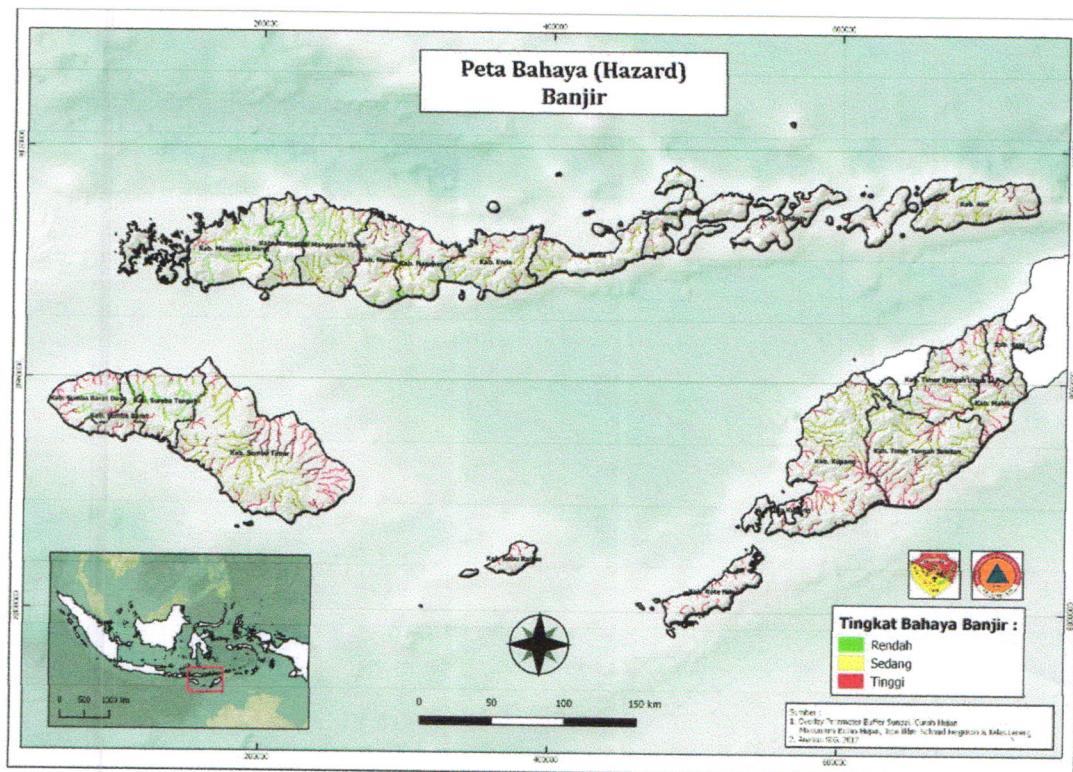
Tabel 3.3 Tabel Wilayah dengan Ancaman Longsor Sedang dan Tinggi

NO	WILAYAH	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Pulau Timor - Kupang, TTS, TTU, Malaka, Belu	✓	✓	
2	Pulau Sumba- SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur	✓		
3	Pulau Lembata- Hadakewa, Waiteba		✓	
4	Pulau Alor - Kokar, Moru		✓	
5	Pulau Flores.	✓		

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.1.2. Hidrometeorologi

A. Banjir

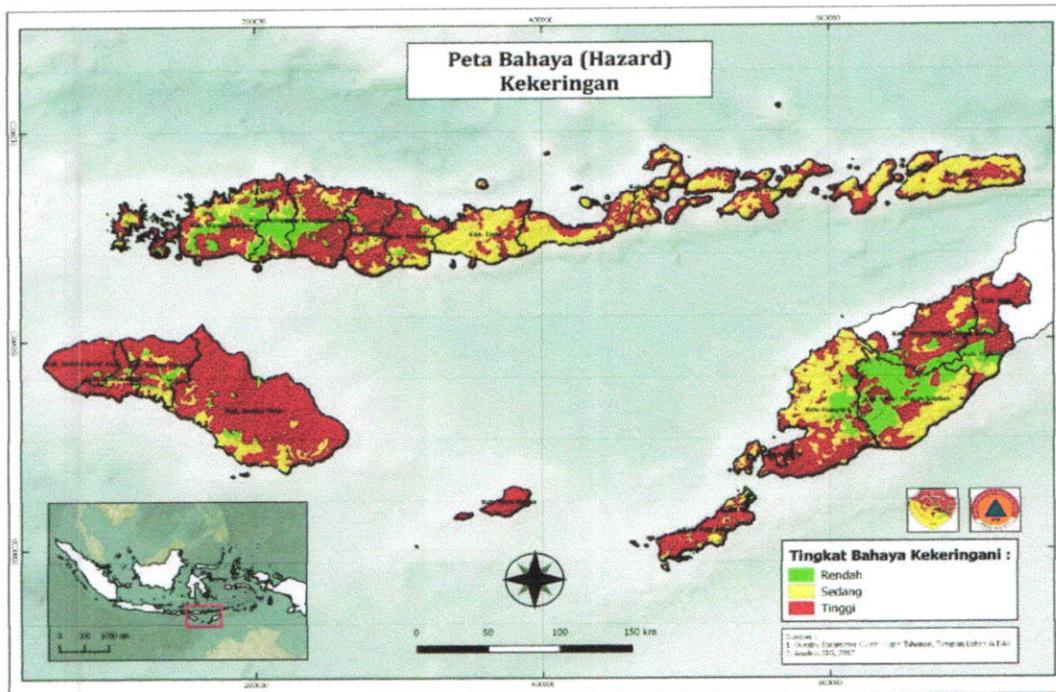


Gambar 3.5 Peta Ancaman Banjir NTT

Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Wilayah NTT yang memiliki sejarah banjir cukup panjang juga adalah di wilayah DAS Benanain di sepanjang Kab. TTS, TTU dan bermuara di Kab. Malaka. Ancaman banjir juga terdapat di beberapa daerah lainnya seperti ditunjukkan pada **Gambar 3.5** menunjukkan bahwa ancaman banjir di provinsi ini berada pada tingkat bahaya tinggi di sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota, kecuali Kab. Sikka, Lembata, dan Ende.

B. Kekeringan

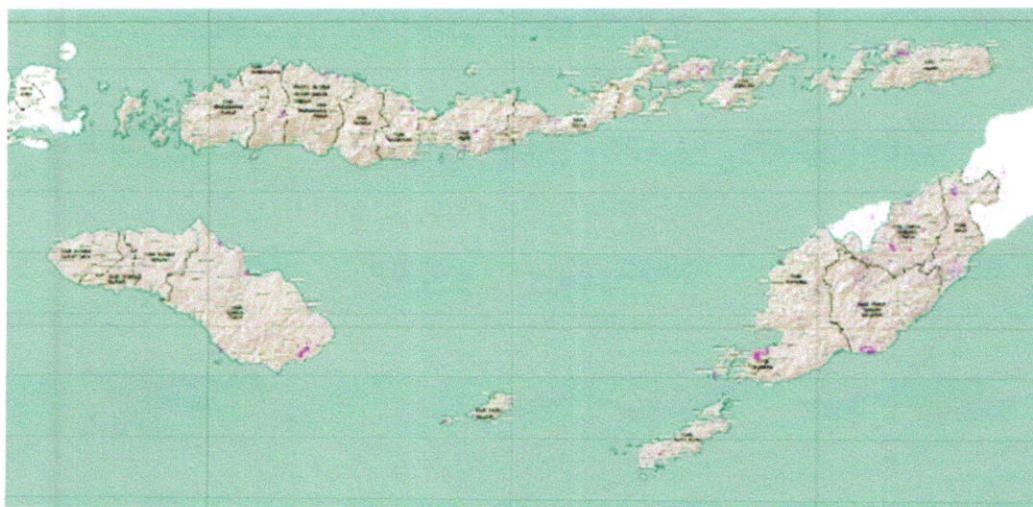


Gambar 3.6 Peta Wilayah Kekeringan di NTT

Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

Di Provinsi NTT, pemetaan terhadap ancaman kekeringan yang tersaji pada Gambar 3.6, menunjukkan bahwa ancaman kekeringan berada **tinggi** di semua Kabupaten/Kota, pengecualian hanya di bagian tengah Timor dan sebagian Flores bagian barat.

C. Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2011

Gambar 3.7 Peta Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi

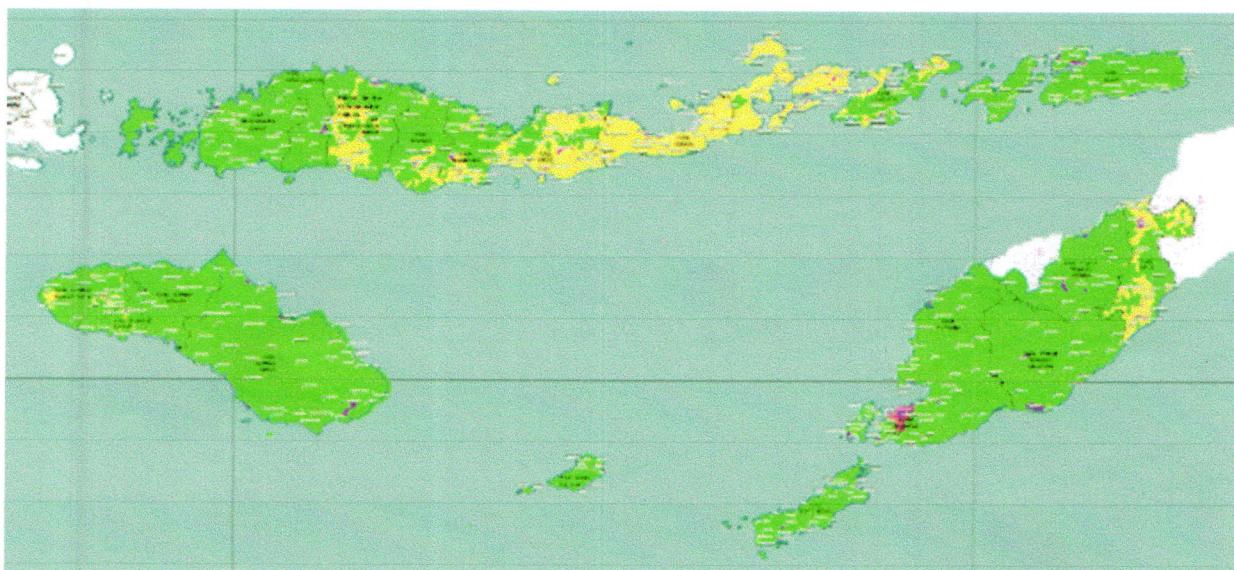
Pemetaan ancaman yang dilakukan terhadap wilayah Provinsi NTT menunjukkan bahwa tingkat ancaman **tinggi** terdapat di pesisir pantai Kota Kupang, Pulau Sumba bagian selatan, Pulau Timor bagian selatan, dan pesisir utara Kepulauan Alor . Sedangkan sebagian besar wilayah pantai berada pada tingkat ancaman **rendah** terhadap ancaman gelombang ekstrim dan abrasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 3.7** di atas.

Tabel 3.4 Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi dengan Skala Tinggi

No	Wilayah/Kabupaten	Keterangan
1	Pulau Sumba	Waikahaka, Patiate, Prikalogu, Tarimbang, Wahang, Tawui, Melolo, Rambangaru.
2	Pesisir Pantai Kota Kupang	Oesapa, Kelapa Lima, Namosain
3	Pulau Timor bagian selatan	Boking, Kolbano, Toineke, Tablolong
4	Selatan pesisir Pulau Alor	Maritang, Erana, Batulolong, Buraga, Kui.

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.1.3. Biologi (Epidemi dan Wabah Penyakit)



Gambar 3.8 Peta Ancaman Epidemi/Wabah Penyakit

Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2011

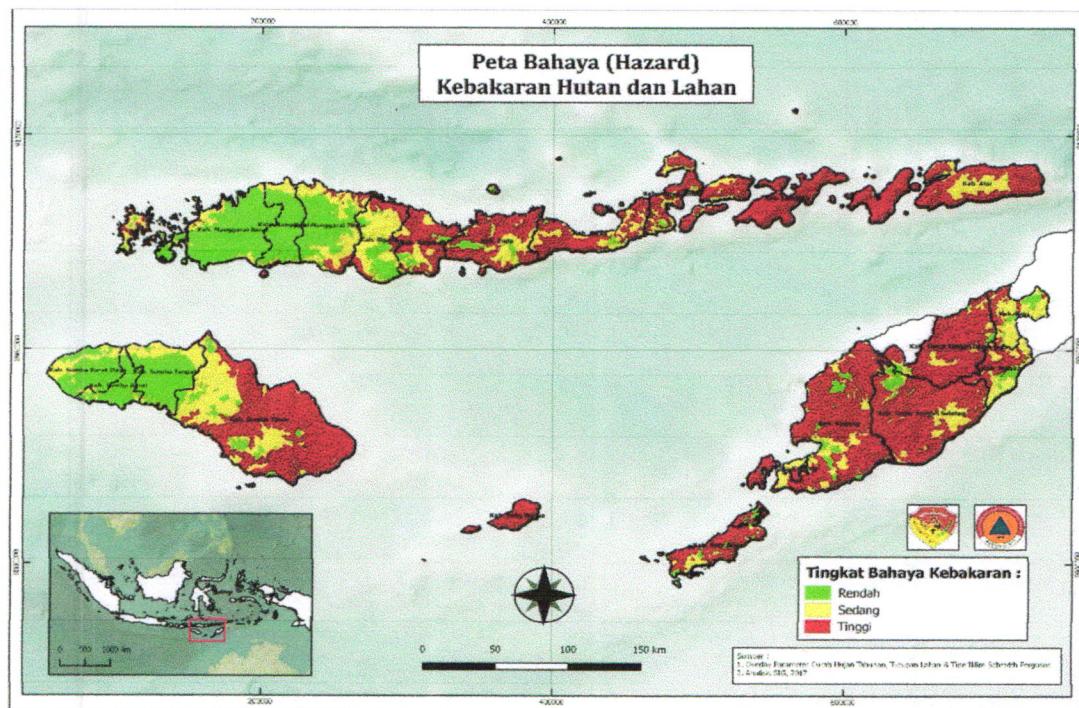
Pemetaan potensi ancaman menunjukkan bahwa ancaman **tinggi** terjadi di Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Ende dan Kota Kupang. Namun **secara umum** tingkat ancaman KLB penyakit (epidemi dan wabah penyakit) untuk Provinsi NTT berada pada tingkat **rendah**. Daerah dengan tingkat ancaman sedang adalah Kab. Ngada dan Kab. Sikka. Hasil pemetaan tersebut tersaji pada **Gambar 3.8**. Penyebaran epidemi dan wabah penyakit dapat dilihat pada tabel berikut, meliputi wilayah:

Tabel 3.5 Ancaman Epidemi dan Wabah Penyakit

No	KABUPATEN	SKALA	
		SEDANG	TINGGI
1	Kab.Ngada	✓	
2	Kab Sikka	✓	
3	Kab Sumba Barat		✓
4	Kab Lembata		✓
5	Kab Ende		✓
6	Kota Kupang		✓

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.1.4. Kegagalan Teknologi: kebakaran hutan dan lahan



Gambar 3.9 Peta Wilayah Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di NTT

Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2017

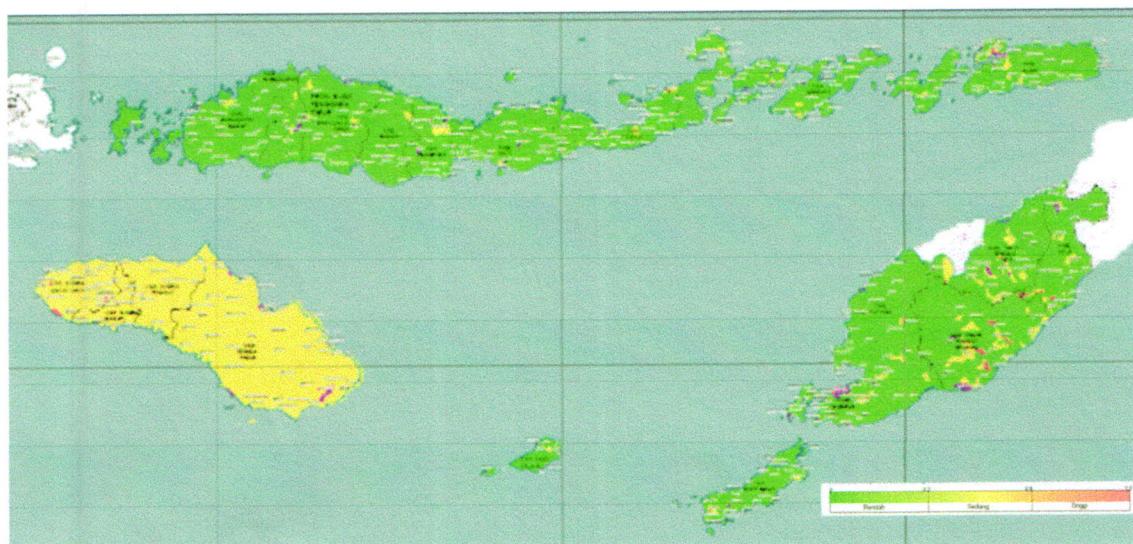
Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT pada beberapa wilayah berada pada **tingkat tinggi** seperti dibagian timur P. Sumbawa, bagian timur P. Flores, bagian timur pulau Alor, dan bagian selatan Pulau Timor. Sedangkan sebagian besar wilayah lain memiliki tingkat ancaman sedang. Hasil pemetaan tersebut tersaji pada **Gambar 3.9** di atas.

Tabel 3.6 Ancaman Kebakaraan Lahan/Hutan dengan Skala Tinggi dan Sedang

NO	WILAYAH	SKALA	
		TINGGI	SEDANG
1	Pulau Sumba –Bagian Timur	✓	
2	Pulau Flores – Bagian Timur	✓	
3	Pulau Alor - Bagian Timur	✓	
4	Pulau Timor – Bagian Selatan	✓	
5	Wilayah NTT lainnya		✓

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.1.5. Sosial



Gambar 3.10 Peta Ancaman Konflik Sosial di NTT

Sumber : Hasil Pemetaan Ancaman, 2011

Hasil pemetaan ancaman yang disajikan pada **Gambar 3.10** menunjukkan bahwa tingkat ancaman konflik sosial di Provinsi NTT berada pada tingkat rendah kecuali di Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab Alor, dan semua Kabupaten di Pulau Sumba.

3.2. KERENTANAN

Kajian kerentanan merujuk pada Kajian Risiko Bencana NTT 2011. Alur pembahasannya mengelompokkan jenis kerentanan sesuai dengan kategori ancaman pada sub Bab 3.1.

3.2.1. Geologi

A. Gempa Bumi

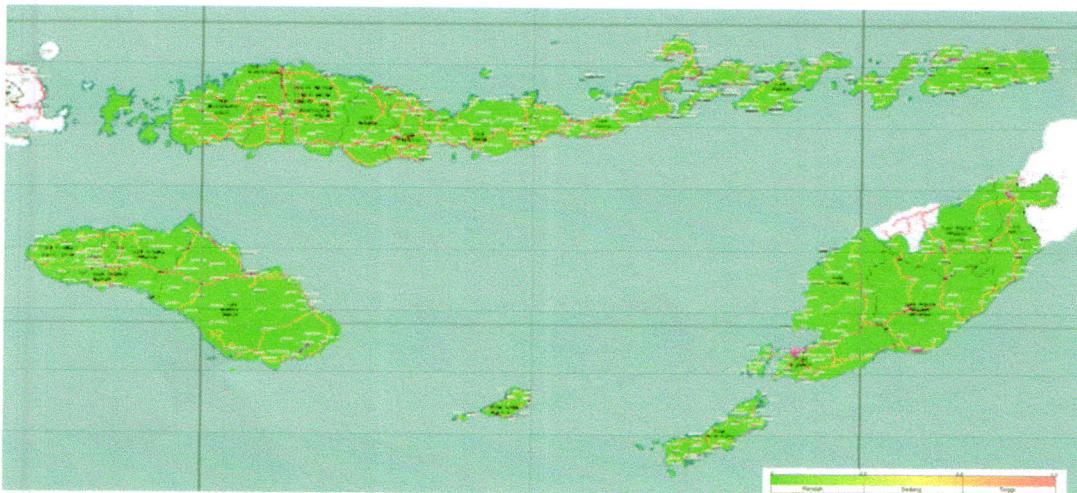
Kerentanan tinggi terdapat di Kota Kupang dan Ibukota-ibukota Kabupaten seperti Soe, Kefamenanu, Atambua, Waingapu, Labuanbajo, Ruteng, Bajawa, Maumere, Lewoleba, Ende,

Sikka dan Kalabahi. Kejadian gempa Alor 2004 yang menunjukkan bahwa kerusakan lebih banyak terjadi daerah perkotaan, terlebih karena keberadaan infrastruktur dan permukiman, seperti di Kota Kalabahi. Sebagai contoh, dampak dari gempa Alor adalah sebagai berikut:

Korban Manusia. Korban yang meninggal: 16 orang (2 orang dari Teluk Mutiara, Alor Tengah Utara 4 orang, Alor Timur Laut 8 orang, Alor Timur 1 orang, Pantar 1 orang. Ditambah lagi 65 orang luka berat rawat inap di halaman rumah sakit umum dan korban yang lain dirawat di Maritaing dan Bukapiting. Selain itu, 1.222 rumah penduduk rusak total, berat dan ringan.

Kerusakan fasilitasi publik: Tembok pelabuhan roboh sepanjang 100 m, jalan raya antara Maritaing dan Kalabahi putus di Sibone 20 km dan rusak sekitar 98 km, tembok bangunan PLN Rusak parah, sekitar 90 % rumah/bangunan di kota itu rusak, tembok pengaman di belakang penjara rusak berat, landasan pacu bandara Kalabahi retak dan terbelah, dan komunikasi telepon seluler terganggu.

Hasil pemetaan kerentanan bisa dilihat pada gambar 3.11 berikut:



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.11. Peta Kerentanan Gempa Bumi di Provinsi NTT

Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan, terdapat 14 kabupaten/kota dikategorikan tinggi:

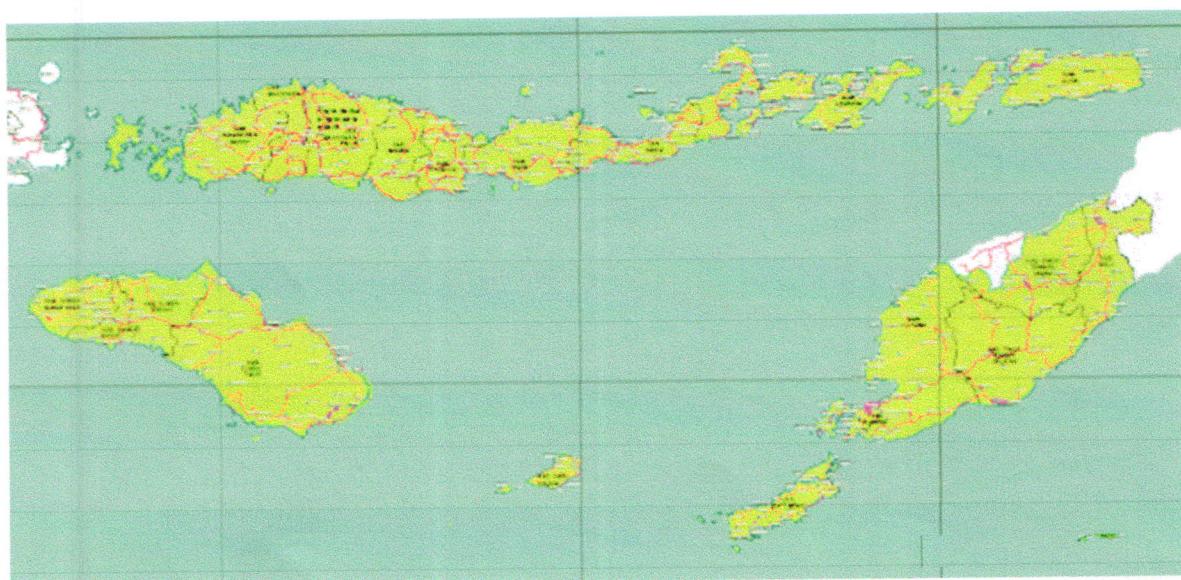
Tabel 3.7 Kerentanan terhadap Gempa Bumi

NO	KAB/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Kota Kupang	✓		
2	Sumba Timur	✓		
3	Manggarai Barat	✓		
4	Manggarai	✓		
5	Nagekeo	✓		
6	Sikka	✓		

7	Ende	✓		
8	Belu	✓		
9	Malaka	✓		
10	TTU	✓		
11	TTS	✓		
12	Rote Ndao	✓		
13	Lembata	✓		
14	Alor	✓		

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

B. Tsunami



Gambar 3.12 Peta Kerentanan Tsunami di NTT

Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Tingkat kerentanan untuk bencana tsunami di pesisir pantai Provinsi NTT rata-rata berada pada tingkat ancaman sedang seperti di pesisir tenggara Pulau Timor, pesisir utara Pulau Flores, pesisir tenggara Pulau Alor, dan pesisir utara Pulau Rote. Sedangkan untuk tingkat ancaman tinggi terdapat di pesisir tenggara Pulau Rote. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Tsunami tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Kerentanan terhadap Tsunami

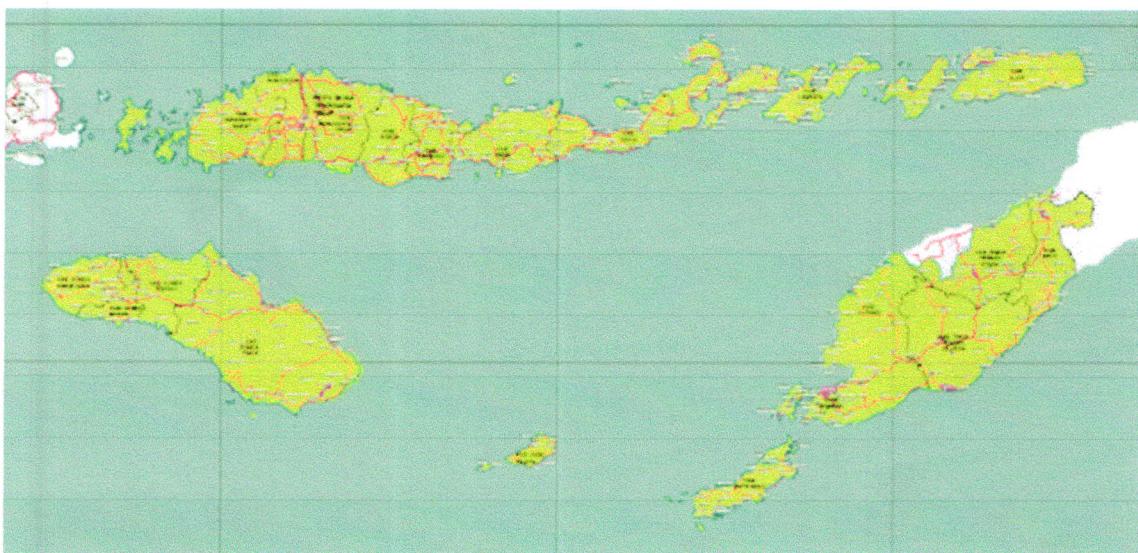
NO	KAB/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Ende		Sepanjang pesisir pantai	
2	Sikka	Pesisir utara, P. Babi		
3	Manggarai Barat		Sepanjang pesisir pantai	

4	Kabupaten Alor	Pesisir utara		
5	Rote Ndao	Pesisir utara dan pesisir tenggara		
6	Sumba Timur		Sepanjang pesisir pantai selatan	
7	Sumba Tengah		Sepanjang pesisir pantai selatan	
8	Sumba Barat Daya		Sepanjang pesisir pantai selatan	
9	Lembata		Sepanjang pesisir pantai	
10	Kabupaten Kupang		Sepanjang pesisir pantai	
11	Kabupaten Belu	Pesisir utara		

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana NTT 2011 dan website BMKG

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kerentanan **tinggi** terdapat di pesisir utara Sikka termasuk P. Babi dan Alor, Rote Ndao (termasuk pesisir tenggara), dan Belu. Sedangkan kategori **sedang** terjadi di Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Lembata, dan Kabupaten Kupang.

C. Letusan Gunung Api



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

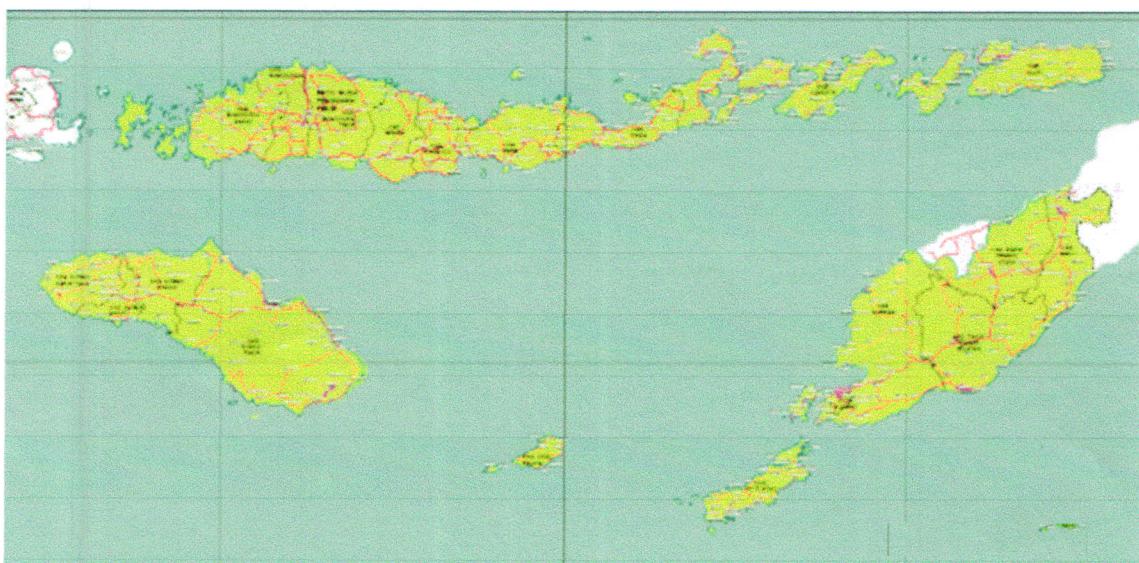
Gambar 3.13 Peta Kerentanan Letusan Gunung Api di NTT

Kerentanan letusan gunung api di Provinsi NTT tepatnya di Pulau Flores yang memiliki gunung api memiliki kerentanan sedang di Kab. Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur. Sedangkan kerentanan tinggi terdapat di Kab. Nagekeo. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.14**. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Gunung Api tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9 Kerentanan terhadap Gunung Api

NO	KAB/KOTA	Luas wilayah kerentanan tinggi
1	Flotim	<ul style="list-style-type: none">• 2.684 ha lahan di sekitar Gn. Illeboleng;• 620 ha lahan di sekitar Gn. Lewotobi Laki – Laki dan Perempuan;
2	Lembata	Gunung Api Ili Werung dan Gunung Api Lewotolo menyebabkan Gempa Vulkanis A 11x dan 46x; Gempa Vulkanis B 4x dan 4x, dengan status normal.
3	Sikka	Letusan gunung Egon, Rokatenda.
4	Manggarai	Kerentanan tinggi
5	Manggarai Timur	Kerentanan tinggi
6	Ngada	Kerentanan tinggi
7	Nagekeo	Kerentanan tinggi
8	Ende	Kerentanan tinggi
9	Alor	Kerentanan tinggi

D. Tanah Longsor



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.14 Peta Kerentanan Tanah Longsor di Provinsi NTT

Kerentanan bencana Tanah Longsor di Provinsi NTT memiliki tingkat kerentanan sedang dan tinggi. Di Pulau Flores sebagian besar wilayah memiliki tingkat kerentanan tinggi, begitu juga di Pulau Lembata, Timor, dan Rote. Sedangkan di Pulau Sumba dan Kepulauan Alor, daerah dengan kerentanan longsor sedang dan tinggi memiliki proporsi yang hampir sama. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.15**.

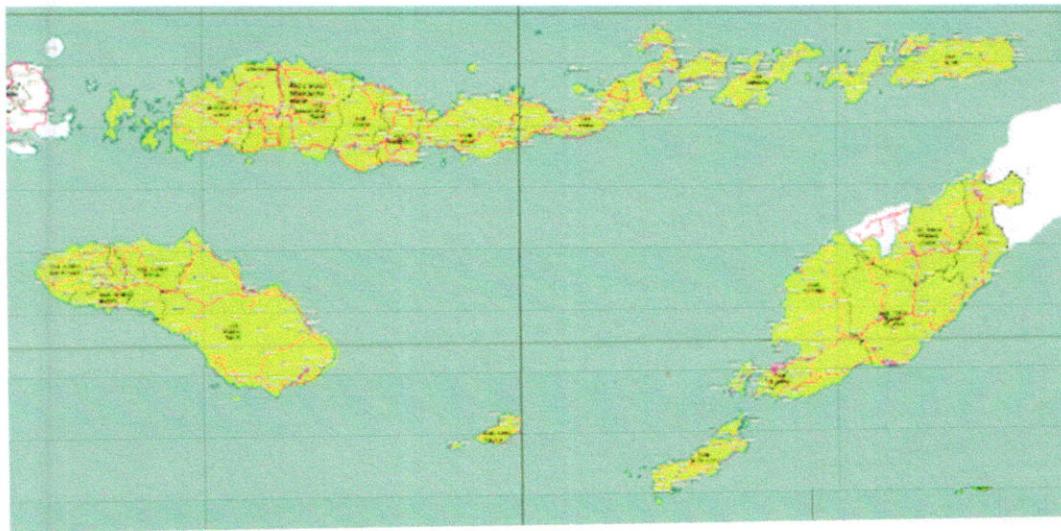
Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan, terdapat 9 kabupaten dengan kerentanan tinggi, yakni Flores Timur, Lembata, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende dan Alor.

Tingkat kerentanan pada 9 daerah kabupaten ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor:

- Faktor fisik. Berupa tingkat kepadatan bangunan di daerah rawan longsor dan panjang jalan yang rawan terhadap tanah longsor senilai Rp. 31.454,95 miliar.
- Faktor sosial. Tingkat kepadatan penduduk di daerah rawan longsor sebanyak 1.930.939 jiwa, tingginya penduduk usia lanjut di daerah rawan longsor sebanyak 107.757 jiwa, penduduk berkebutuhan khusus sebanyak 874 jiwa.
- Kerentanan Lingkungan. Kerentanan lingkungan lebih disebabkan oleh kurangnya tumbuhan di daerah lereng rawan longsor, luas areal rawan longsor seluas 1.405.368,09 Ha.
- Kerentanan Ekonomi. Kerentanan ekonomi dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja di daerah rawan longsor (petani), dan tingginya presentasi rumah tangga miskin yang tinggal di daerah rawan longsor serta jumlah asset penghidupan berupa tanaman produktif di daerah rawan longsor. Diprediksikan bahwa jumlah asset rentan di daerah rawan longsor sebesar Rp.91.655,84 miliar.

3.2.2. Hidrometeorologi

A. Banjir



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.15 Peta Kerentanan Banjir di NTT

Kerentanan terhadap bencana banjir di wilayah Provinsi NTT memiliki tingkat kerentanan yang tinggi 10 kabupaten, antara lain Kab. Belu, Malaka, Manggarai, dan sebagainya. Sementara di kabupaten – kabupaten lain rata-rata kerentanan terhadap banjir di tingkat

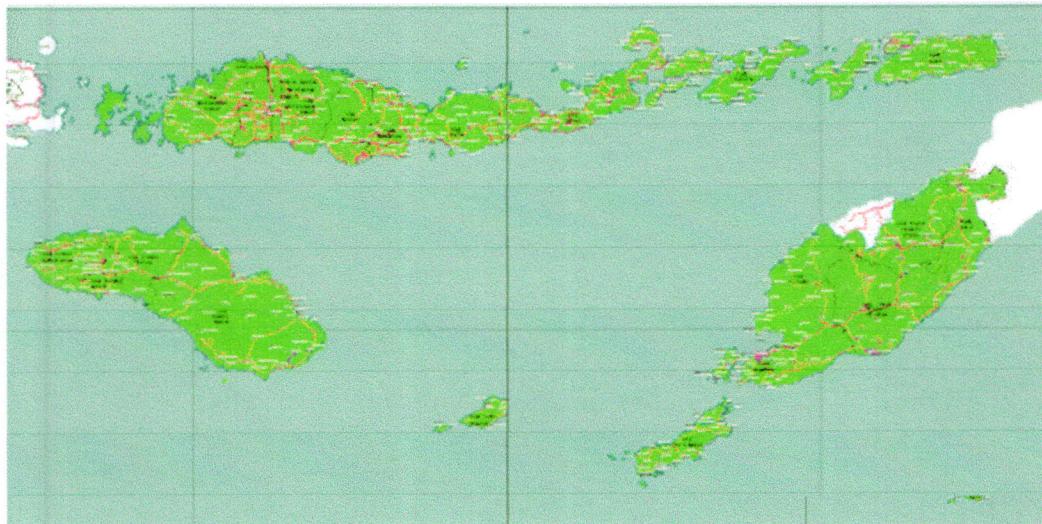
sedang. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.16**. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Banjir tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10 Kerentanan terhadap Banjir

NO	KAB/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Alor		✓	
2	Belu	✓		
3	Ende	✓		
4	Flotim	✓		
5	Kota Kupang		✓	
6	Kabupaten Kupang		✓	
7	Lembata		✓	
8	Manggarai	✓		
9	Manggarai Barat		✓	
10	Manggarai Timur	✓		
11	Ngada	✓		
12	Nagekeo	✓		
13	Rote Ndao	✓		
14	Sumba Barat			✓
15	Sumba Barat Daya			✓
16	Sumba Tengah			✓
17	Sumba Timur		✓	
18	TTS		✓	
19	TTU		✓	
20	Sikka	✓		
21	Malaka	✓		

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

B. Kekeringan



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.16 Peta Kerentanan Kekeringan di NTT

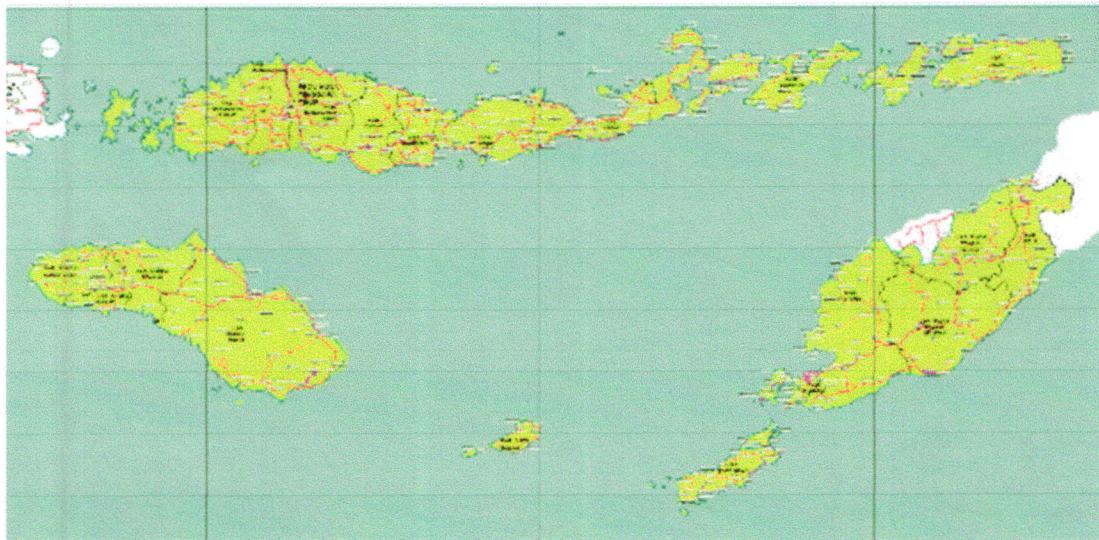
Kerentanan terhadap bencana kekeringan di wilayah Provinsi NTT memiliki tingkat kerentanan yang tinggi hampir di semua Kabupaten. Kabupaten/kota yang wilayahnya memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana kekeringan antara lain Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Manggarai, dan Kab. Sikka. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.18**. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Kekeringan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11 Kerentanan terhadap Kekeringan

NO	KAB/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Ende	✓		
2	Kota Kupang	✓		
3	Kabupaten Kupang		✓	
4	Rote Ndao	✓		
5	Sabu Raijua	✓		
6	Sumba Timur		✓	
7	Manggarai	✓		
8	Sikka	✓		
9	Belu	✓		

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

C. Gelombang Ekstrim dan Abrasi



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.17 Peta Kerentanan Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kerentanan terhadap gelombang ekstrim dan abrasi di pesisir pantai Provinsi NTT sebagian besar memiliki kerentanan cukup tinggi antara lain di pesisir pantai selatan P. Timor, di seluruh pesisir P. Rote, di pesisir utara dan barat P. Sumba, di selatan dan utara P. Flores, serta di selatan dan utara P. Lembata. Sedangkan sisanya memiliki kerentanan sedang. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.18**.

Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Gelombang Ekstrim dan Abrasi tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12 Kerentanan terhadap Gelombang Ekstrim dan Abrasi

NO	KABUPATEN/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	FLOTIM	V		
2	ALOR	V		
3	ENDE	V		
4	KABUPATEN BELU		V	
5	LEMBATA	V		
6	NGADA	V		
7	ROTE NDAO	V		
8	SIKKA	V		
9	SUMBA BARAT DAYA	V		
10	SUMBA TIMUR	V		
11	TTS	V		
12	TTU		V	

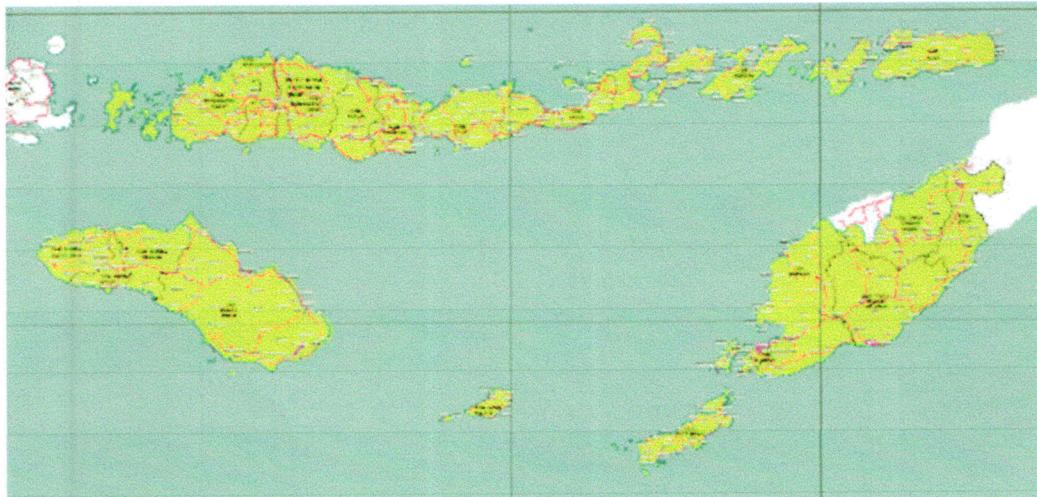
Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

Luas wilayah terdampak dari gelombang ekstrim dan abrasi adalah 102.007 ha. Jumlah penduduk terpapar sebanyak 85.634 jiwa. Sedangkan indeks kerugian ekonomi sebesar Rp 152.358,14 miliar.

3.2.3. Biologi

Hanya ada satu jenis kerentanan bencana biologi yang dikaji dalam KRB Provinsi NTT tahun 2011, yakni epidemi/wabah penyakit. Hasil kajian dipaparkan di bawah ini.

A. Epidemi dan Wabah Penyakit



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.18 Peta Kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit di NTT

Kerentanan terhadap epidemi dan wabah penyakit di Provinsi NTT memiliki tingkat kerentanan sedang dan tinggi. Di Pulau Flores sebagian besar wilayah memiliki tingkat kerentanan tinggi, begitu juga di Pulau Lembata, Timor, dan Rote. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.19**. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Epidemi dan Wabah Penyakit tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Kerentanan Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

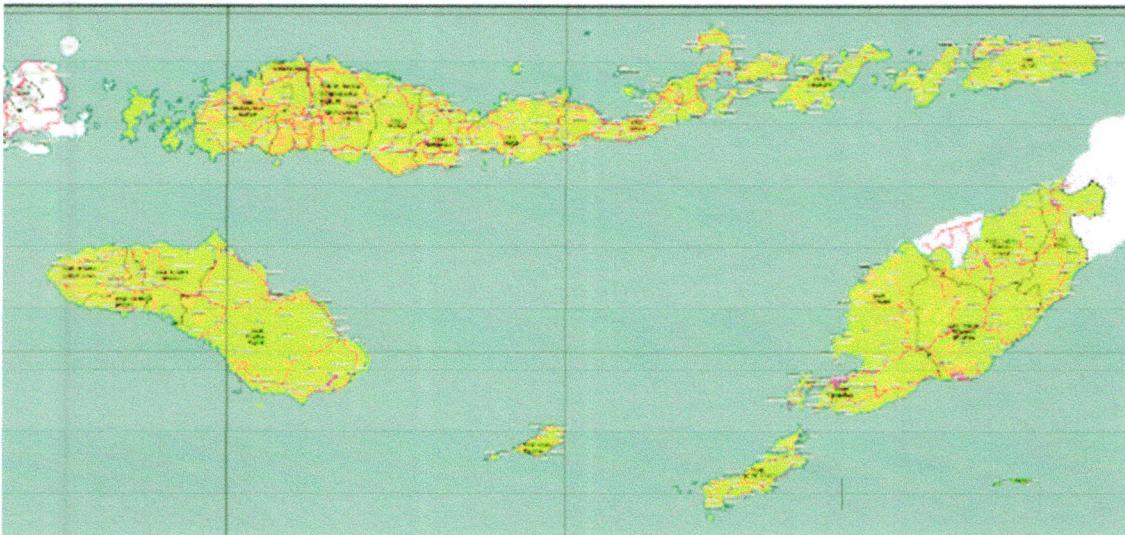
NO	KABUPATEN/WILAYAH	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Ende	✓		
2	Sikka	✓		
3	Manggarai	✓		
4	Lembata	✓		
5	Timor	✓		
6	Rote	✓		
7	Sumba Barat		✓	
8	Sumba Timur		✓	
9	Alor		✓	

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.2.4. Kegagalan Teknologi

Hanya ada satu jenis kerentanan bencana karena kegagalan teknologi yang dikaji dalam Kajian Risiko Bencana NTT tahun 2011, yakni kebakaran hutan dan lahan. Hasil kajian dipaparkan di bawah ini.

A. Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.19 Peta Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kategori tinggi terjadi di Kab. Flores Timur, dan Kab. Sikka. Sedangkan sebagian besar wilayah lainnya memiliki

kerentanan sedang. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.20**. Dari hasil pemetaan tingkat kerentanan Kebakaran Hutan/Lahan tersebut dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

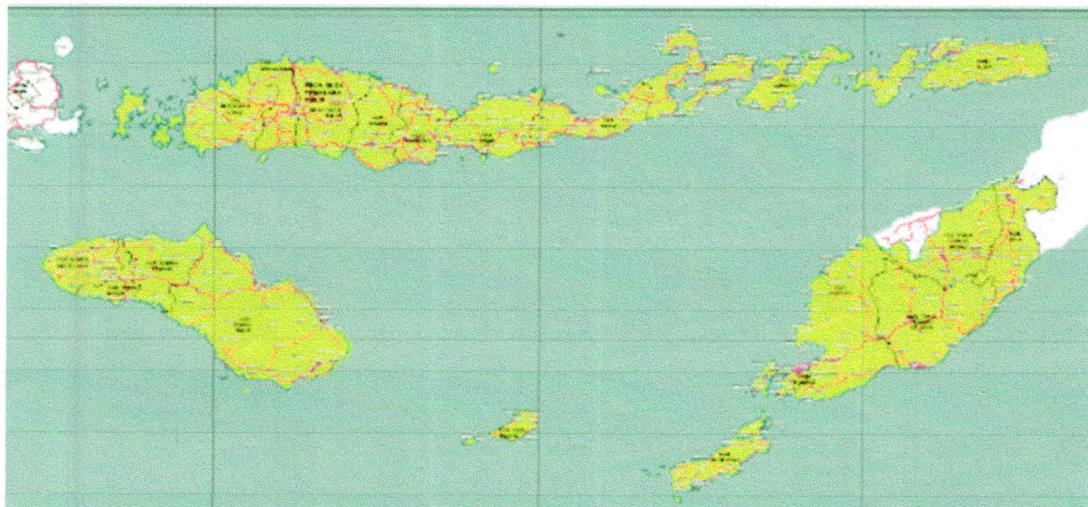
Tabel 3.14 Kerentanan Tinggi terhadap Kebakaran Hutan/Lahan

NO	KAB/KOTA	SKALA		
		TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	Flotim	✓		
2	Sikka	✓		
3	Sumba Timur	✓		
4	Sumba Barat	✓		
5	Kabupaten Kupang	✓		

Sumber: Kajian Risiko Bencana NTT 2011

3.2.5. Sosial

A. Konflik Sosial



Sumber : Hasil Pemetaan Kerentanan, 2011

Gambar 3.20 Peta Kerentanan Konflik Sosial di NTT

Kerentanan akibat konflik sosial memiliki tingkat kerentanan sedang dan tinggi. Di Pulau Flores sebagian besar wilayah memiliki tingkat kerentanan tinggi, begitu juga di Pulau Lembata, Timor, dan Rote. Hasil Pemetaan Kerentanan dapat dilihat pada **Gambar 3.21**. Berdasarkan kabupaten, wilayah dengan kerentanan terhadap konflik tinggi adalah Flores Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Barat, Kabupaten Kupang dan Rote Ndao.

3.3. KAJIAN KEMUNGKINAN DAMPAK BENCANA

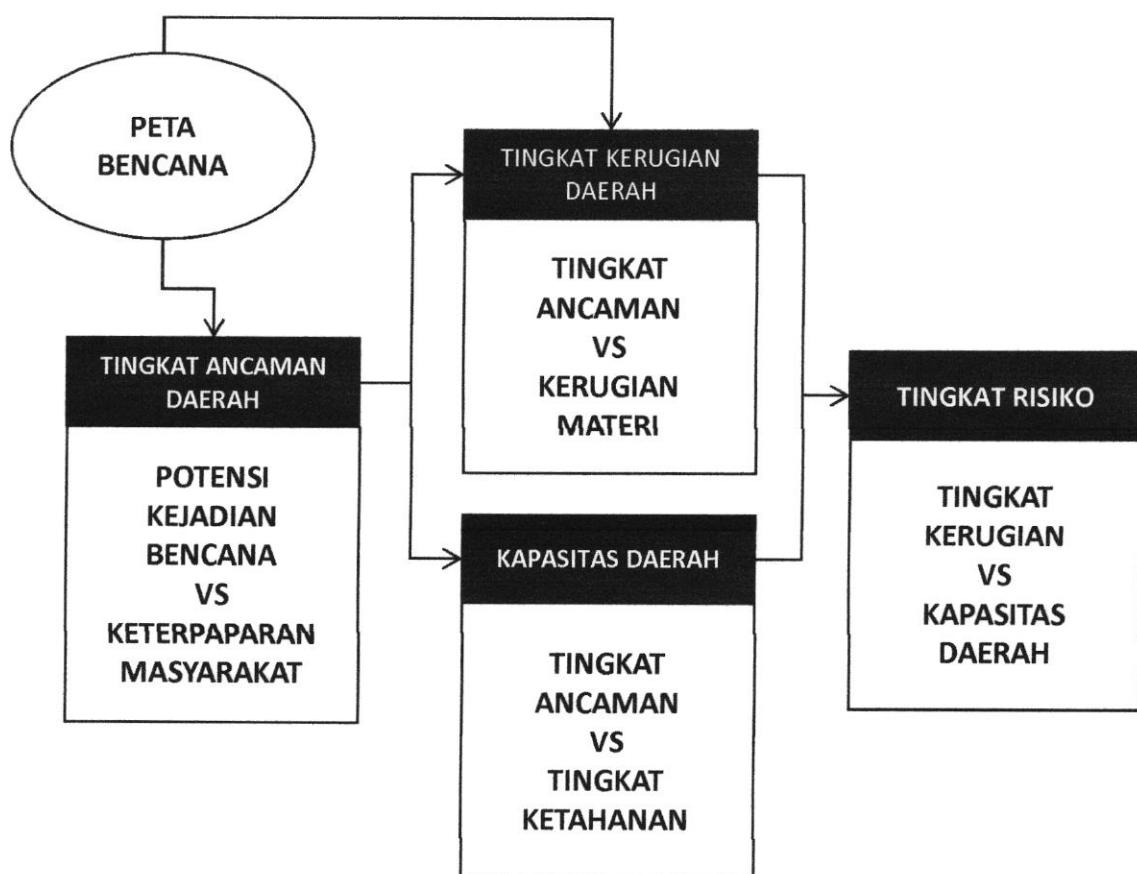
Berdasarkan identifikasi bencana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka dihasilkan indeks bencana yang selanjutnya akan diolah menjadi kajian risiko bencana. Dalam melakukan penelaahan kajian risiko bencana, maka pedoman yang digunakan adalah

Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana Nasional yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2011. Pada pedoman disebutkan bahwa kajian risiko bencana akan memberikan gambaran umum daerah terkait tingkat risiko suatu bencana pada setiap daerah.

Kajian risiko terdiri atas penentuan tingkat ancaman, penentuan tingkat kerugian dan penentuan tingkat kapasitas. Proses ini merumuskan kembali hasil pemetaan dan suplemen peta yang berupa matriks ke dalam tabel nilai yang telah ditentukan.

Salah satu tujuan kajian risiko ini dilaksanakan adalah untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi pengurangan risiko bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan hubungan antara pemerintah kabupaten/kota hingga nasional, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi intervensi dan dukungan yang diberikan dari nasional dan provinsi untuk kabupaten/kota yang telah menyelesaikan kajian. Berikut adalah grafik yang menggambarkan alur untuk analisis kajian risiko bencana:

Gambar 3.21 Pembagian Kajian Risiko



Dari grafik tersebut maka dibuatlah penentuan tingkat untuk tiap variabel. Penentuan dilakukan dengan menghubungkan dua nilai yang dijabarkan sesuai dengan karakteristik bencana tersebut. Berikut adalah penjelasan masing –masing kajian:

3.3.1. Kajian Tingkat Ancaman

Ancaman merupakan pemicu eksternal maupun internal terhadap kejadian yang bisa menimbulkan bencana di Nusa Tenggara Timur. Untuk kajian ancaman terdapat dua komponen yang dipertimbangkan yaitu 1) jumlah masyarakat terpapar yaitu komposisi kelompok masyarakat yang berpotensi terkena bencana dan 2) indeks ancaman yang berasal dari peta ancaman. Dari masing –masing komponen yaitu penduduk terpapar dan indeks ancaman dibagi menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah.

Penentuan tingkat ancaman dengan mencocokkan nilai masing –masing indeks. Warna tempat pertemuan nilai tersebut melambangkan Tingkat Ancaman suatu bencana. Pada tabel di bawah akan digambarkan penentuan tingkat ancaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Tabel 3.15 Matriks Kajian Ancaman Bencana

TINGKAT ANCAMAN		INDEKS PENDUDUK TERPAPAR		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS ANCAMAN	RENDAH	Gelombang Ekstrim dan Abrasi		Epidemi Penyakit, Sosial Wabah Konflik
	SEDANG			Tsunami Letusan Gunung Api Kebakaran hutan & lahan
	TINGGI			Gempa Bumi Longsor Banjir Kekeringan

Rendah	sedang	tinggi
--------	--------	--------

Tabel tersebut menggambarkan bahwa tingkat ancaman untuk setiap bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk pada tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pada kategori ancaman rendah terdapat satu jenis bencana yaitu gelombang ekstrim dan abrasi yang secara kejadian sangat jarang dan tidak berdampak besar pada kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Sementara ancaman sedang terdapat bencana epidemi wabah penyakit dan konflik sosial. Apabila dipadankan dengan riwayat kejadian, kedua jenis ancaman ini memang sedikit memberi dampak kepada penduduk yang bertempat tinggal di Nusa Tenggara Timur.

Sementara pada kategori ancaman tinggi termasuk di dalamnya tujuh (7) bencana yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, longsor, banjir, dan kekeringan. Untuk tipe ancaman kategori tinggi ini, memang sudah seringkali menjadi isu prioritas provinsi, utamanya seperti banjir dan kekeringan sebagai karakteristik fisik yang tergambaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3.2. Kajian Tingkat Kerentanan

Kerentanan merupakan keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atauancaman. Semakin tinggi nilai kerentanannya maka, semakin besar dampak negatif bencana yang mengenai wilayah tersebut. Pada perhitungan dalam kajian kerentanan, akan dilihat besar kerugian materi yang muncul akibat pengrusakan bencana.

Tingkat kerugian baru dapat disusun bila tingkatancaman pada suatu daerah telah dikaji. Tingkat kerentanan diperoleh dari penggabungan tingkatancaman dengan indeks kerugian. Penentuan tingkat kerentanan dilakukan dengan menggunakan matriks seperti berikut:

Tabel 3.16 Matriks Kajian Tingkat Kerentanan

TINGKAT KERENTANAN		INDEKS KERUGIAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH			Gelombang Ekstrim dan Abrasi
	SEDANG		Epidemi/Wabah Penyakit Konflik Sosial	
	TINGGI			Gempa Bumi Tsunami Letusan Gunung Berapi Longsor Banjir Kekeringan Kebakaran hutan & lahan
		Rendah	sedang	tinggi



Dari tabel tersebut tergambaran bahwa tingkat kerugian untuk setiap bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk pada kategori sedang dan tinggi apabila terjadi ancaman dari jenis bencana apapun. Hal tersebut cukup logis dikarenakan besarnya luasan cakupan wilayah dan juga minimnya kesejahteraan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, mengakibatkan tingginya potensi untuk mengalami kerugian apabila terjadi bencana.

3.3.3. Kajian Tingkat Risiko

Perhitungan dari masing – masing kajian baik itu ancaman dan kerugian akan dipadukan bersama dengan kapasitas. Hasil yang muncul adalah kajian risiko setiap bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerugian akan dapat memposisikan daerah tersebut pada tingkatan risiko yang berbeda.

Analisis risiko bencana dilakukan untuk mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi dan menurunkan tingkat risiko, sedangkan tujuannya adalah mengetahui sejauh mana tingkat risiko wilayah dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.

Tabel 3.17 Matriks Kajian Tingkat Risiko Bencana

TINGKAT RISIKO BENCANA		TINGKAT KERENTANAN		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGKAT ANCAMAN	RENDAH	Gelombang Ekstrim dan Abrasi		
	SEDANG	Epidemi/Wabah Penyakit Konflik Sosial		
	TINGGI			Gempa Bumi Tsunami Letusan Gunung Berapi Longsor Banjir Kekeringan Kebakaran hutan & lahan
		Rendah	Sedang	tinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat risiko untuk semua jenis bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori sedang dan tinggi. Hal tersebut sudah

mempertimbangkan tingkat ancaman dan kerugian yang muncul akibat bencana dibandingkan dengan kemampuan masing –masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena tingkat risiko bencana tinggi akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat provinsi.

3.3.4. Kajian Kapasitas Daerah

Kajian kapasitas daerah merujuk pada tujuh prioritas kapasitas daerah. Ketujuh prioritas tersebut mencakup:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana



Sumber: Analisa Kapasitas Daerah NTT 2017

Gambar 3.22 Gambar Indeks per Prioritas Provinsi NTT 2017

Indeks kapasitas dikategorikan dalam tiga (3) kelompok yaitu rendah (≤ 0.4), sedang ($0.4 < x < 0.8$), dan tinggi (≥ 0.8). Secara umum indeks kapasitas daerah NTT adalah 0.56. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas Provinsi NTT masuk dalam kategori **sedang**. Dari ketujuh prioritas, yang masuk dalam kategori sedang namun mendekati tinggi (0.8: tinggi)

adalah “Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan”. Pemerintah sudah memiliki inisiatif dan peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana namun belum ada perubahan sistemik dimana peraturan tersebut belum dijadikan sebagai rujukan peraturan pemerintah dalam pembangunan di daerah ini.

Sedangkan kategori rendah adalah “Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana” sebesar 0.4. Hal yang berkontribusi terhadap rendahnya kapasitas tersebut adalah tidak adanya mekanisme pemulihan pelayanan dasar pemerintah, adanya inisiatif dalam pemulihan infrastruktur penting, perbaikan rumah penduduk, dan pemulihan penghidupan masyarakat namun inisiatif tersebut tidak disertai pencapaian minimal. Ditemui juga bahwa inisiatif-inisiatif di atas belum dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana maupun sebagai rujukan kebijakan pemerintah daerah lainnya.

BAB 4 PILIHAN TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yang dikeluarkan oleh BNPB, ditetapkan 71 indikator ketahanan daerah yang dirumuskan dari 3 strategi pengurangan risiko bencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan kebijakan tersebut, pilihan tindakan penanggulangan bencana dalam RPB Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun berdasarkan 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk Penanggulangan bencana, yang diuraikan dalam 71 indikator.

Dalam kerangka Siklus Penanggulangan Bencana, tujuh Prioritas IKD bisa dikategorikan dalam tahap pra, saat dan paska bencana, sebagai berikut:

A. TAHAP PRA BENCANA:

1. Prioritas 1: PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN
2. Prioritas 2: PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU
3. Prioritas 3: PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK
4. Prioritas 4: PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA
5. Prioritas 5: PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

B. TAHAP SAAT TANGGAP DARURAT:

6. Prioritas 6: PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

C. PASKA BENCANA

7. Prioritas 7: PRIORITAS VII PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

Berdasarkan Kajian Ancaman, Kerentanan dan Risiko sebagaimana dalam BAB III yang diperkaya dengan masukan multipihak dalam Lokakarya Multipihak serta Kajian Kapasitas Daerah, maka dirumuskan pilihan – pilihan tindakan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4.1 Pilihan Tindakan Prioritas Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi NTT 2018 – 2023

4.1. PRA BENCANA

PRIORITAS I PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
1	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB	Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		
2	Peraturan Daerah tentang Pembentukan PB	Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD	Belum optimalnya pelaksanaan aturan penyelenggaraan penanggulangan bencana Prov. NTT	Sosialisasi Perda No. 3 tahun 2009 ke kabupaten – kabupaten.
3	Peraturan tentang pembentukan Forum PRB	Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB		
4	Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan		
5	Peraturan Daerah tentang RPB	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	Belum ada produk hukum RPB (baik Perda maupun Pergub), walaupun ada dokumen dan sudah direvisi.	Pengajuan Perda/Pergub RPB sebagai sesuatu yang mendesak.
6	Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB	Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana		Review Perda RTRW untuk integrasi PRB.
7	BPBD	Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD	Beberapa BPBD kabupaten-kabupaten di NTT masih Tipe B, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan peran koordinasi.	Advokasi peningkatan status kelembagaan BPBD Tipe B pada tingkat provinsi di Biro Organisasi.
8	Forum PRB	Optimalisasi Pencapaian Fungsi Forum	Belum optimal fungsi dan tugas Forum	Memaksimalkan peran sektor swasta dan

		PRB	PRB sebagai forum multistakeholders dan mitra pemerintah.	sumber dayanya dalam mendukung PB. Integrasi rencana kerja Forum PRB dalam anggaran pemerintah.
9	Komitmen DPRD terhadap PRB	Diskusi Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Belum optimalnya pemahaman dan dukungan DPRD terhadap PRB yang nampak dari minimnya alokasi anggaran daerah.	Diskusi intensif antara Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah

PRIORITAS II PENGKAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
10	Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuanya sesuai dengan aturan	Peta bahaya dan kajian yang ada dibuat tahun 2011 dan tidak maksimal.	Penyusunan peta dan kajian bahaya terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.
			Bencana yang lintas batas administratif dan butuh kajian kawasan (mis. DAS, dataran, sentra produksi, Gn. Api, dll)	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian bahaya berbasis kawasan.
11	Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuanya sesuai dengan aturan	Peta kerentanan dan kajian yang ada dibuat tahun 2011 dan tidak maksimal.	Penyusunan peta dan kajian kerentanan terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.
			Bencana yang lintas batas administratif dan butuh kajian kawasan (mis. DAS, dataran, sentra produksi, Gn. Api, dll)	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian kerentanan berbasis kawasan.
12	Peta Kapasitas dan kajiannya	Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuanya sesuai dengan aturan	Peta kapasitas dan kajian yang ada dibuat tahun 2011 dan tidak maksimal.	Penyusunan peta dan kajian kapasitas terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.
			Bencana yang lintas batas administratif dan butuh kajian kawasan (mis. DAS, dataran, sentra produksi, Gn. Api, dll)	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian kapasitas berbasis kawasan.

13	Rencana Penanggulangan Bencana	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Belum maksimal revisi reguler RPB NTT.	Revisi RPB 2018 – 2023 menjadi 2024 – 2029 pada tahun 2023.
----	--------------------------------	--	--	---

PRIORITAS III PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	Kebijakan terkait dengan Mekanisme Penyebar Luasan Informasi kebencanaan (Kabupaten ke Provinsi & Provinsi Ke Pusat)	Penyusunan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan. Simulasi pengumpulan dan penyebaran informasi baik di tingkat provinsi maupun koordinasi kabupaten – provinsi.
15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat		Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat Masyarakat umum belum memahami tentang risiko bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana lintas lembaga	Belum ada mekanisme koordinasi berkala lintas sektor dan lintas stakeholders untuk komunikasi penanggulangan bencana.	Rapat koordinasi berkala lintas sektor dan lintas stakeholders.
17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Pusdalops provinsi maupun kabupaten belum berfungsi maksimal.	Pembuatan SOP pengumpulan dan penyebaran informasi dan aktivasi Pusdalops.
18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem	Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah.	Sistem pendataan tersedia tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.	Optimalisasi sistem pendataan bencana, baik Posko maupun SIMADU.

	pendataan bencana nasional			
19	Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB		Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
20	Penyelenggaraan Latihan (Geladi) Kesiapsiagaan	Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut.	Gladi masih tidak teratur dilakukan, baik di kantor pemerintah maupun di sekolah dan fasilitas layanan publik.	Menyelenggarakan gladi berkala untuk jenis – jenis bencana dengan indeks tinggi di kantor – kantor pemerintah dan sekolah.
21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah	Belum ada kajian kebutuhan peralatan dan logistik di beberapa BPBD kabupaten.	Mendorong penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.
22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.		Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.
23	Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah		
24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana		Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana	Belum semua wilayah memiliki cadangan listrik untuk penanganan darurat bencana.	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana		Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana

PRIORITAS IV PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
27	Penataan ruang berbasis PRB	Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana	RTRW belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko bencana.	Penyelarasan RTRW dengan peta risiko bencana provinsi dan kabupaten.
28	Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah		Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah
29	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Penguatan 3 Pilar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana pada Daerah Berisiko	Gerakan Sekolah/Madrasah Aman Bencana belum berdasarkan peta Risiko Bencana.	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tumpang susun peta Sekolah/Madrasah dengan peta Risiko Bencana.
30	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Penyelenggaraan simulasi kedaruratan di rumah sakit pemerintah (minimal 1x per tahun) setelah identifikasi risiko bencana RS/Puskesmas.	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk tumpang susun peta posisi RS/Puskesmas dengan peta Risiko Bencana.
31	Desa Tangguh Bencana	Pembangunan Desa Tangguh Bencana	Desa Tangguh Bencana belum dilaksanakan secara merata.	Data lokasi Destana dan sosialisasi disparitas lokasi Destana pada multistakeholders. Pembangunan Destana secara lebih luas.

PRIORITAS V PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
32	Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	Catatan: Resapan air dalam konteks NTT juga berguna untuk antisipasi kekeringan.	Pembuatan aturan wajib sumur resapan/biopori untuk bangunan – bangunan baru di wilayah perkotaan.

	bencana banjir			Dukungan terhadap inisiatif konservasi air, baik tanam pohon, tanam air (biopori/sumur resapan), dan sebagainya serta kebijakan yang menguatkan inisiatif tersebut.
33	Perlindungan daerah tangkapan air	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air		Koordinasi dengan Dinas LH untuk mereview AMDAL bangunan atau aktivitas industri di kawasan rawan banjir dan longsor dan daerah tangkapan air
34	Restorasi Sungai	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai		
35	Penguatan Lereng	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng		Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
36	Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan			
37	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan		Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
38	Pemantauan berkala hulu sungai	Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang		Kerjasama kabupaten/kota dalam wilayah DAS untuk pencegahan dan peringatan dini banjir bandang
39	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi	Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi pada pemberian IMB		

40	Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko	Upaya mitigasi tsunami masih terbatas.	Penguatan mitigasi tsunami, baik berbasis struktur maupun berbasis ekosistem.
41	Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir		Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir dan Kekeringan.
42	Restorasi lahan gambut untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan	-		
43	Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS		Konservasi vegetatif di kawasan DAS untuk mencegah tanah longsor

4.2. SAAT TANGGAP DARURAT

PRIORITAS VI PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
44	Rencana Kontijensi Gempabumi	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	Belum dilakukannya simulasi/gladi berkala	Gladi berkala di daerah berisiko tinggi gempa bumi.
45	Rencana Kontijensi Tsunami	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi	Belum tersedianya rencana kontijensi provinsi yang lintas kabupaten untuk daerah berisiko tinggi tsunami.	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi tsunami.
46	Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah	Alat pendekripsi dan peringatan dini tsunami hanya ada di 2 kota dengan jangkauan yang terbatas.	Mengembangkan SPD tsunami dengan memanfaatkan teknologi maupun kearifan lokal.
47	Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami	Belum ada rencana evakuasi tsunami di kebanyakan daerah berisiko tinggi tsunami.	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami
48	Rencana kontijensi banjir	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi	Belum tersedianya rencana kontijensi	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi

		bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	provinsi yang lintas kabupaten untuk daerah berisiko tinggi banjir.	(lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi banjir.
49	Sistem peringatan dini bencana banjir	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	Ada alat pendekripsi banjir di 6 wilayah DAS di NTT dan informasi curah hujan tetapi belum efektif sebagai peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan banjir.	Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal SPD banjir dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait, serta memaksimalkan kearifan lokal.
50	Rencana kontijensi tanah longsor	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	Belum tersedianya rencana kontijensi provinsi yang lintas kabupaten untuk daerah berisiko tinggi longsor.	Penyusunan rencana kontinjenji provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi longsor.
51	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	Ada informasi curah hujan yang bisa diandalkan, tetapi belum efektif sebagai peringatan dini tanah longsor.	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana tanah longsor di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.
52	Rencana Kontijensi Kebakaran Lahan dan Hutan	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	Belum tersedianya rencana kontijensi provinsi yang lintas kabupaten untuk daerah berisiko kebakaran lahan dan hutan.	Penyusunan rencana kontinjenji provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi kebakaran lahan dan hutan.
53	Sistem peringatan dini bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	Ada informasi dini titik api yang bisa diandalkan, tetapi belum efektif sebagai peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.
54	Rencana kontijensi erupsi gunungapi	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi	Beberapa kawasan risiko tinggi letusan gunung api belum memiliki Rencana Kontinjenji.	Penyusunan rencana kontinjenji kawasan risiko tinggi letusan gunung api.
55	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah	Beberapa kawasan risiko tinggi letusan gunung api belum memiliki Sistem	Mendorong perbaikan alat pendekripsi letusan gunung api dan pengembangan

			Peringatan Dini dan alat pendekripsi dalam kondisi rusak.	Sistem Peringatan Dini di kawasan risiko tinggi letusan gunung api.
56	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi	Belum ada instruktur evaluasi bencana letusan gunung api.	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi
57	Rencana kontijensi kekeringan	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	Belum tersedianya rencana kontijensi provinsi yang lintas kabupaten untuk daerah berisiko tinggi kekeringan.	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi kekeringan.
58	Sistem peringatan dini bencana kekeringan	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	Sudah ada pemantauan indikator awal kekeringan, tetapi belum efektif sebagai peringatan dini.	Penguatan sistem peringatan dini kekeringan sesuai dengan rencana kontinjensi dan memaksimalkan kearifan lokal.
59	Rencana kontijensi banjir bandang	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	Belum ada rencana kontinjensi banjir bandang, karena masih tidak dibedakan dengan banjir.	Membuat rencana kontinjensi banjir bandang di daerah berisiko tinggi berdasarkan kajian risiko banjir bandang.
60	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	Belum ada karena tidak dibedakan dengan banjir.	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
61	Penentuan Status Tanggap Darurat	Penetapan Status Darurat Bencana	Belum jelasnya kewenangan penentuan status tanggap darurat	Penyusunan SOP penetapan status darurat dan penghentiannya
62	Penerapan sistem komando operasi darurat	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana		
63	Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana	Sudah ada Tim Kaji cepat di beberapa stakeholders. Khusus BPBD, belum dilengkapi dengan legalitas.	Membuat kebijakan tentang Tim Kaji cepat, termasuk SOP kaji cepat dan koordinasi dengan sektor lain.
64	Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis		
65	Perbaikan Darurat	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana		Penyusunan SOP mekanisme perbaikan darurat
66	Pengerahan bantuan pada	Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat		

	masyarakat terjauh	darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme		
67	Penghentian status Tanggap Darurat Bencana	Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana		Catatan: digabung dengan penetapan status darurat

4.3. PASKA BENCANA

PRIORITAS VII PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA

No	Indikator	Kerangka Aksi	Isu Strategis NTT	Prioritas Pilihan Tindakan
68	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Sudah ada kegiatan pemulihan tetapi belum ada rencana pemulihan.	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
69	Pemulihan infrastruktur penting	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Sudah ada kegiatan pemulihan tetapi belum ada rencana pemulihan.	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
70	Perbaikan rumah penduduk	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Sudah ada kegiatan pemulihan tetapi belum ada rencana pemulihan.	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
71	Pemulihan Penghidupan masyarakat	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat paska bencana	Sudah ada kegiatan pemulihan tetapi belum ada rencana pemulihan.	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat paska bencana
			Belum masuknya pemulihan psikis/psikologi paska bencana	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lembaga agama untuk penyusunan Rencana Pemulihan Psikis Korban.

BAB 5 MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Kebijakan penanggulangan bencana NTT menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di NTT. Dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan tingkat ketahanan NTT, maka diformulasikan mekanisme Penanggulangan Bencana Provinsi NTT.

Mekanisme ini merupakan turunan dari kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana yang selain harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, juga harus disinergiskan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini bermanfaat dalam melihat ketercapaian program nasional serta mempermudah Provinsi NTT dalam mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Kebijakan Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT mengikuti prinsip umum Penanggulangan Bencana tingkat Nasional yaitu :

1. Cepat dan tepat
2. Prioritas
3. Koordinasi dan keterpaduan
4. Berdaya guna dan berhasil guna
5. Transparansi dan akuntabel
6. Kemitraan
7. Pemberdayaan
8. Non diskriminatif
9. Non proletisi

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana provinsi NTT, maka visi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT adalah:

"TERWUJUDNYA NTT SIAGA BENCANA"

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Penanggulangan Bencana NTT yang perlu dilaksanakan dan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis Pengurangan Risiko Bencana;
2. Mengoptimalkan pelayanan logistik, pemanfaatan peralatan dan penggerahan sumber daya manusia dalam kondisi tanggap darurat;
3. Meningkatkan upaya pemulihan masyarakat dan membangun sarana prasarana korban bencana;
4. Meningkatkan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.



Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

5.1. PRA BENCANA

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BPBD Provinsi NTT adalah fungsi koordinasi. Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana.

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Dalam situasi ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Perencanaan penanggulangan bencana. Selain Rencana Penanggulangan Bencana, setiap daerah perlu menyusun serangkaian rencana terkait lainnya baik untuk kondisi pra-bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Rencana yang perlu diformulasikan meliputi:
 - a. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang merupakan tindak lanjut dari RPB NTT
 - b. Rencana Kontijensi
 - c. Rencana Operasional
 - d. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Pemulihan)
2. Pengurangan risiko bencana
3. Pencegahan
4. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, di mana pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil kajian risiko bencana sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan daerah. Selain itu juga mendorong pemerintah kabupaten/kota guna menyusun Kajian Risiko Bencana tingkat kabupaten /kota sehingga ada kesinambungan perencanaan kabupaten/kota dan Provinsi NTT.
5. Persyaratan analisis risiko bencana;
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. Penelitian, pendidikan dan pelatihan yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui riset-riset kebencanaan. Selain itu bisa juga dilakukan langkah strategis seperti Pengintegrasian Konsep Kebencanaan di dalam Kurikulum Sekolah/kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
8. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Selanjutnya dalam situasi dimana terdapat potensi bencana, maka yang dibutuhkan adalah kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil untuk mendukung upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah Provinsi. Kunci utama keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendekripsi ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kapasitas local dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan system kesiapsiagaan yang efektif.

Penting juga untuk membangun sistem kesiapsiagaan daerah yang menyeluruh, terukur dan terpadu. Pembangunan sistem kesiapsiagaan ini difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini dan perencanaan kontinjenji bencana. Pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan teknologi dan kearifan lokal. Sistem ini harus dapat menyampaikan informasi peringatan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu Pemerintah Provinsi NTT perlu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana bersifat lokal.

Pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah penyusunan rencana kontinjenji bencana. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun rencana kontinjenji untuk jenis ancaman bencana utama sebagai prioritas untuk ditanggulangi bersama pemerintah kabupaten/ kota. Dengan tersusunnya Rencana Kontijensi, diharapkan dapat terjaminnya ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan logistic serta kesiapsiagaan dalam memobilisasi sumber daya yang tersedia di daerah, dengan mekanisme yang telah disepakati bersama.

5.2. SAAT TANGGAP DARURAT

Tanggap darurat merupakan tindakan yang perlu diambil saat masa krisis dan masa darurat. Tanggap darurat dilaksanakan untuk menyelamatkan korban bencana sekaligus melakukan upaya – upaya secara cepat dan tepat agar kehidupan masyarakat korban bencana kembali normal. Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan kepada tanggap darurat bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

5.3. PASCA BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

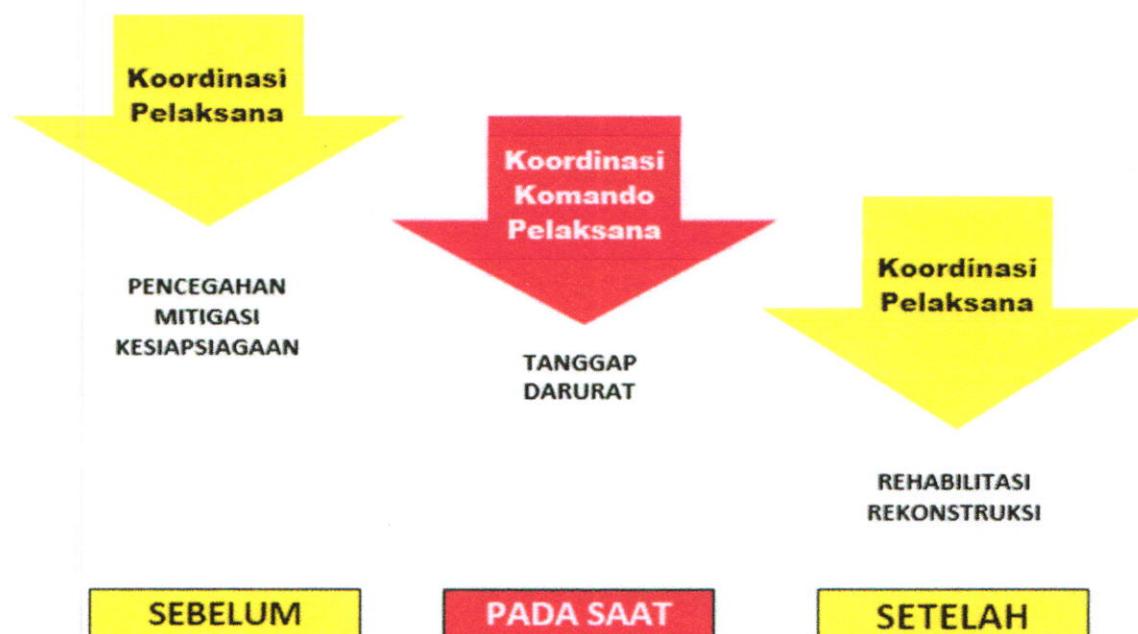
1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

Secara lebih rinci antara lain dapat dilihat pada Bab VI yang menyajikan Pilihan Tindakan Penanggulangan Bencana.

5.4. MEKANISME PENANGGULANGAN BENCANA

Untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan RPB NTT secara terpadu , strategi pelaksanaan akan difokuskan pada monitoring intensif pelaksanaan RPB NTT oleh institusi terkait PB di NTT.

Mekanisme penanggulangan bencana yang akan dianut dalam hal ini adalah mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu :



1. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana,
2. Pada saat Darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana
3. Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

BAB 6 ALOKASI TUGAS DAN SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Provinsi NTT tidak bekerja sendiri; melainkan berkoordinasi dengan institusi terkait lainnya, baik institusi pemerintah ataupun non-pemerintah. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh OPD/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

6.1. KEGIATAN-KEGIATAN YANG DILAKUKAN

6.1.1. Organisasi Pemerintah

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah, BPBD memerlukan koordinasi dengan instansi dari berbagai sektor. Secara garis besar, kegiatan organisasi pemerintah lintas sektor untuk penanggulangan bencana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah
2. Sektor Perencanaan, merencanakan tata ruang daerah berbasis pengurangan risiko dan program pembangunan untuk mengurangi risiko
3. Sektor Kesehatan, merencanakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan dan medis termasuk obat-obatan dan para medis
4. Sektor Pendidikan, merencanakan dan melaksanakan pelayanan pendidikan darurat dan pemberian materi penanggulangan bencana di sekolah
5. Sektor Sosial, merencanakan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi
6. Sektor Pekerjaan Umum, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana
7. Sektor Perhubungan, merencanakan dan memenuhi kebutuhan transportasi dan komunikasi
8. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi
9. Sektor Pertanian, mensosialisasikan pertanian ramah lingkungan dan mengurangi budaya tebas-bakar untuk pengolahan lahan pertanian
10. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan dan melaksanakan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana
11. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pasca bencana
12. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya kebakaran hutan/lahan serta konservasi wilayah hulu daerah aliran sungai

13. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana
14. Sektor Kelautan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai
15. Sektor Lembaga Penelitian dan Pendidikan Tinggi, melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
16. BMKG, memantau dan memberikan informasi peringatan dini, khususnya untuk bencana banjir dan kekeringan
17. Badan SAR, merencanakan dan melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban bencana
18. TNI/POLRI, membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.

6.1.2. Organisasi Masyarakat dan Swasta

1. Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.

2. Swasta

Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan kesiapsiagaan dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

3. Lembaga Non-Pemerintah

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik, lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.

4. Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian

Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

5. Media

Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui

kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.

6. Lembaga Internasional

Pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian, penerimaan bantuan tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2. TUGAS DAN FUNGSI

Tabel 6.1 menunjukkan alokasi tugas dan fungsi para pihak dalam pelaksanaan pilihan – pilihan kegiatan dalam RPB.

Tabel 6.1 Alokasi Tugas Para Pihak dalam Penanggulangan Bencana

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Organisasi																				
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	Dinkes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din-LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din- PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy	Orgs PBB
TAHAP PRA BENCANA Prioritas i: Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Sosialisasi Perda No. 3 tahun 2009 ke kabupaten – kabupaten.	o			Δ																	
	Pengajuan Perda/Pergub RPB sebagai sesuatu yang mendesak.	o																				
	Review Perda RTRW untuk integrasi PRB.	o			Δ							Δ		Δ				Δ				
	Advokasi peningkatan status kelembagaan BPBD Tipe B pada tingkat provinsi di Biro Organisasi.	o																				
	Memaksimalkan peran sektor swasta dan sumber dayanya dalam mendukung PB.	o																Δ				
	Integrasi rencana kerja Forum PRB dalam anggaran pemerintah.	o			Δ													Δ	Δ	Δ		
	Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	o			Δ														Δ			
	Penyusunan peta dan kajian bahaya terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.	o	Δ						Δ		Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
TAHAP PRA BENCANA Prioritas 2: Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian bahaya berbasis kawasan.	o									Δ		Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	

Pilihan Tindakan	Organisasi	Kegiatan																			
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	Dinkes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy
TAHAP PRA BENCANA Prioritas 3: Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penyusunan peta dan kajian kerentanan terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.	○									△	△		△	△	△					
	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian kerentanan berbasis kawasan.	○								△	△	△		△	△	△			△	△	△
	Revisi RPB 2018 – 2023 menjadi 2024 – 2029 pada tahun 2023.	○											△								
TAHAP SIAGA BENCANA Prioritas 4: Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penyusunan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan.	○		△				△	△					△					△		
	Simulasi pengumpulan dan penyebaran informasi baik di tingkat provinsi maupun koordinasi kabupaten – provinsi.	○		○				○	△					△					△	△	△
	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	○		△				△													
	Sosialisasi Peta Risiko Bencana dengan cara kreatif, termasuk iklan/ baliho di tempat umum.	○						○						△					△	△	△
	Rapat koordinasi berkala lintas sektor dan lintas stakeholders.	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	Pembuatan SOP pengumpulan dan penyebaran informasi dan aktivasi Pusdalops.	○		△				△													
	Optimalisasi sistem pendataan bencana, baik Posko maupun SIMADU.	○						△	△												

Pilihan Tindakan	Organisasi	Kegiatan																			
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	DinKes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy
TAHAP PRA BENCANA Prioritas 4: Penanganan Tematik Kawasan Bencana	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	o				△															
	Menyelenggarakan gladi berkala untuk jenis – jenis bencana dengan indeks tinggi di kantor – kantor pemerintah dan sekolah.	o	o	o	o	o	o	o		o	o										
	Menyusun Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.	o	△			△															
	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.	o			△																
	Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana	o																			
	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana.	o																	△	△	△
	Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana.	o	o					o								o	o	o	△	△	△
TAHAP SIAGA DAN BENCANA Prioritas 5: Penanganan Bencana	Penyelarasan RTRW dengan peta risiko bencana provinsi dan kabupaten.	o			o											o		o		+	
	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	o			o					△	△	△	△	△	△	△	△	△	+	+	
	Penyusunan tumpang susun peta Sekolah/Madrasah dengan peta Risiko Bencana.	o							o							△	△	△	+	+	

Pilihan Tindakan	Organisasi	Kegiatan																			
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	Dinkes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din-H	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din-PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy
Prioritas 5: Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penyusunan tumpang susun peta posisi RS/Puskesmas dengan peta Risiko Bencana.	o					o														
	Data lokasi Destana dan sosialisasi disparitas lokasi Destana pada multistakeholders.	o	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ									+	+	o	+	
	Pembangunan Destana lebih luas.	o	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ									+	+	o	+	
TAHAP PRA BENCANA	Pembuatan aturan wajib sumur resapan/biopori untuk bangunan – bangunan baru di wilayah perkotaan.	o				o						o				o					
	Dukungan terhadap inisiatif konservasi air, baik tanam pohon, tanam air (biopori/sumur resapan), dan sebagainya serta kebijakan yang menguatkan inisiatif tersebut.	o									Δ						Δ	Δ	Δ	Δ	
	Kajian PRB terhadap AMDAL bangunan atau aktivitas industri di kawasan rawan banjir dan longsor.	o				Δ					Δ	Δ	Δ	Δ			Δ			+	
	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	o									Δ	Δ	Δ						+	+	
	Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	o									Δ	Δ	Δ	Δ							

Pilihan Tindakan	Organisasi	Kegiatan																			
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	DinKes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din-LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy
Prioritas 6: Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penguatan mitigasi tsunami, baik berbasis struktur maupun berbasis ekosistem.	o		Δ				Δ				Δ		Δ		Δ				+	
	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir dan Kekeringan.	o										Δ			o	Δ					
	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS	o										o		o	o	o	Δ	Δ			
	Gladi berkala di daerah berisiko tinggi gempa bumi.	o	o	o		o		o	o		o								o		
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi tsunami.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					Δ	Δ	Δ	+	Δ	+	
	Mengembangkan SPD tsunami dengan memanfaatkan teknologi maupun kearifan lokal.	o		o			o											Δ			
	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami	o				Δ									Δ						
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi banjir.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+	Δ	+	
	Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal SPD banjir dengan memanfaatkan	o		Δ			Δ							Δ	Δ			Δ			

Pilihan Tindakan	Organisasi Kegiatan	BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	DinKes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din-LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy	Orgs PBB
	informasi dari OPD terkait, serta memaksimalkan kearifan lokal.																					
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi longsor.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+	Δ	+
	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana tanah longsor di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.	o		Δ				Δ				Δ		Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi kebakaran lahan dan hutan.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	+	Δ	+	
	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ					Δ			
	Penyusunan rencana kontinjensi kawasan risiko tinggi letusan gunung api.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ				Δ		Δ	Δ	+	Δ	+		
	Mendorong perbaikan alat pendekripsi letusan gunung api dan pengembangan Sistem Peringatan Dini di kawasan risiko tinggi letusan gunung api.	o		o														o	o			

Pilihan Tindakan	Organisasi	Kegiatan																			
		BPBD	Din Sos	BMKG	Bappeda	BASARNAS	DinKes	Din-Infokom	TNI & POLRI	Dinas Ket-Pangan	Din Dikbud	Din LH	Dispenda	Dis Hut	BWS & BPDAS	Din PU	Din ESDM	BU/DOLOG	Per. Tinggi	Swasta	LSM & Masy
TAHAP PASCA BENCANA	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi	o																			
	Penyusunan rencana kontinjenensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi banjir.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	o
	Penguatan sistem peringatan dini kekeringan sesuai dengan rencana kontinjenensi dan memaksimalkan kearifan lokal.	o		o			o			o					o	o	o	o	+	o	+
	Membuat rencana kontinjenensi banjir bandang di daerah berisiko tinggi berdasarkan kajian risiko banjir bandang.	o	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	+
	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang	o		Δ			Δ	Δ					Δ	Δ					Δ		
Prioritas 7: Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	o	Δ				Δ		Δ	Δ	Δ										
	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	o						Δ							Δ						
	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	o	Δ					Δ					o				+	Δ	+		
	Penguatan Kebijakan & Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat paska bencana	o	Δ		Δ				Δ			Δ		Δ					Δ		
	Penyusunan Rencana Pemulihan Psikis Korban Bencana.	o	Δ				Δ										Δ	+			

6.3. SUMBER DANA

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan.

Khusus untuk respon kedaruratan, ada alokasi dana kontinjensi atau dana siap pakai, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dana ini bisa digunakan bila ada pernyataan kondisi darurat oleh Kepala Daerah, berdasarkan rekomendasi dari BPBD provinsi maupun daerah. Tata cara lebih rinci untuk mengakses dana ini diatur bersama dengan DPRD yang bersangkutan.

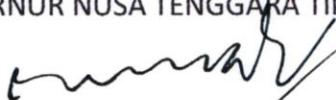
Para pihak dapat juga menerima bantuan dana dari masyarakat maupun organisasi non pemerintah, lembaga – lembaga PBB dan lembaga swasta. Dana – dana ini harus dikelola secara transparan, akuntabel dan memenuhi persyaratan administrasi pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

BAB 7 PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan kajian akademik tentang risiko bencana yang menyajikan bukti valid tentang kebutuhan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, RPB ini adalah panduan perencanaan penanggulangan bencana yang sistematis dan holistik, mencakup tugas dan fungsi organisasi pemerintah dari sektor terkait maupun organisasi masyarakat dan pihak swasta. RPB ini juga bersifat menyeluruh, RPB ini mencakup program dan kegiatan sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Mengingat pentingnya penanggulangan bencana demi efektivitas dan kemajuan pembangunan, maka Rencana Penanggulangan Bencana harus terintegrasi dan harmonis dengan perencanaan pembangunan. Sehingga Peraturan Gubernur ini penting untuk memastikan para pihak yang terlibat memiliki acuan legal dalam perencanaannya.

Untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan konteks pembangunan dan kebencanaan, maka dokumen ini perlu direvisi dalam jangka waktu sesuai regulasi yang berlaku.

↗ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

↗ FRANS LEBU RAYA

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 – 2023

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
Prioritas i: Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Sosialisasi Perda No. 3 tahun 2009 ke kabupaten – kabupaten.	Seluruh BPBD kabupaten/kota memahami tupoksi sesuai Perda 3 2009.	BPBD	Bappeda	x	x	x				x	x	x
	Pengajuan Perda/Pergub RPB sebagai sesuatu yang mendesak.	RPB 2018 – 2023 memiliki status legal sebagai Perda/Pergub	BPBD		x						x		
	Review Perda RTRW untuk integrasi PRB.	PERDA RT/RW memasukkan pertimbangan PRB	BPBD, Bappeda	Dinas LH, Dinas Kehutanan, BWS & BP DAS, Perg. Tinggi	x	x	x	x	x		x		x
	Advokasi peningkatan status kelembagaan BPBD Tipe B pada tingkat provinsi di Biro Organisasi.	Koordinasi dalam Rakornas dan konsultasi dengan BNPPB	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota		x	x	x	x		x	x	x	
	Memaksimalkan peran sektor swasta dan sumber dayanya dalam mendukung PB.	Sektor swasta lebih aktif mendukung kegiatan F-PRB dalam berbagai bentuk.	BPBD	Sektor swasta, Lembaga non pemerintah		x				x	x		x
	Integrasi rencana kerja Forum PRB dalam anggaran pemerintah.	Ada perencanaan bersama multi pihak untuk agenda strategis F-PRB dan adopsi dalam APBD.	BPBD	Bappeda, swasta, LSM, PT, Orgs PBB.	x	x	x	x	x		x		
	Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah	Ada peningkatan pemahaman dari anggota DPRD dari komisi relevan tentang PRB.	BPBD	Bappeda, LSM		x		x			x		x
	Penyusunan peta dan kajian bahaya terbaru dengan menitikberatkan	Ada Kajian Risiko Bencana terbaru sebagai dasar penyusunan RPB periode	BNPB, BPBD Prov	Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, DinHut,				x		x	x		
TAHA P PRA BENC ANA													

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
	pada 7 ancaman prioritas daerah.	2024 - 2029		Dinas PU, Dinas ESDM, BWS & BP DAS, Perguruan Tinggi, LSM.									
	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian bahaya berbasis kawasan.	Ada hasil kajian dan rekomendasi tindak lanjut untuk kelayakan kajian risiko berbasis kawasan.	BPBD	BMKG, Dinas LH, DinHut, Dinas PU, Dinas ESDM, BWS &BP DAS, Perguruan Tinggi, LSM.	X					X		X	
	Penyusunan peta dan kajian kerentanan terbaru dengan menitikberatkan pada 7 ancaman prioritas daerah.	Ada Kajian Risiko Bencana terbaru sebagai dasar penyusunan RPB periode 2024 – 2029	BNPB, BPBD	Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LH, DinHut, Dinas PU, Dinas ESDM, BWS & BP DAS, Perguruan Tinggi, LSM.			X			X	X		X
	Kajian terhadap kelayakan dan peluang penyusunan kajian kerentanan berbasis kawasan.	Ada hasil kajian dan rekomendasi tindak lanjut untuk kelayakan kajian risiko berbasis kawasan.	BPBD	BMKG, Dinas LH, DinHut, Dinas PU, Dinas ESDM, BWS & BP DAS, Perguruan Tinggi, LSM.		X				X		X	
	Revisi RPB 2018 – 2023 menjadi 2024 – 2029 pada tahun 2023.	Tersedia dokumen RPB 2024 – 2029	BPBD	Dinsos, BMKG, Bappeda, Basarnas, Dinkes, Din-Infokom, TNI-Polri, Din Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Din LH, Dispenda, Dishut, BWS-BPDAS, Din PUPR, Din ESDM, Bu/Dolog, Perg Tinggi, LSM. PBB.			X			X		X	
TA H AP PR A	Penyusunan mekanisme penyebarluasan informasi	Ada dokumen SOP dan gladi penyebarluasan informasi	BNPB, BPBD	Dinas Infokom, TNI-POLRI, BWS & BPDAS	X	X	X			X	X		

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
	kebencanaaan.	bencana dari Provinsi ke kabupaten, kecamatan sampai ke masyarakat terjauh.											
	Simulasi pengumpulan dan penyebaran informasi baik di tingkat provinsi maupun koordinasi kabupaten – provinsi.	Simulasi minimal satu kali setahun mulai tahun ke-2.	BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinas Infokom, TNI-POLRI, BWS & BPDAS	X	X	X			X	X	X	
	Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat	Ada SOP Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi masyarakat yang disosialisasikan di minimal 10 kabupaten/kota.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinas Infokom, TNI-POLRI, BWS & BPDAS	X	X	X			X	X	X	
	Sosialisasi Peta Risiko Bencana dengan cara kreatif, termasuk iklan/baliho di tempat umum.	Peta risiko bencana provinsi dan kabupaten diketahui oleh masyarakat luas.	BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinas InfoKom, Dispenda, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X	X		X	X	X	
	Rapat koordinasi berkala lintas sektor dan lintas stakeholders.	Rapat koordinasi lintas sektor dan lintas stakeholders minimal 2x setahun.	BPBD	Semua sektor dan para pihak terkait.	X	X	X	X	X		X		
	Pembuatan SOP pengumpulan dan penyebaran informasi dan aktivasi Pusdalops.	SOP Aktifasi Pusdalops	BNPB, BPBD Prov	BMKG, Dinas Infokom	X						X		X
	Optimalisasi sistem pendataan bencana, baik Posko maupun SIMADU.	Sistem pendataan bencana berfungsi baik dan menghasilkan bahan kajian tahunan PB NTT.	BPBD Prov	Dinas InfoKom, TNI-POLRI	X						X		
	Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB	Bertambahnya jumlah personil BPBD di bidangnya yang memiliki sertifikasi	BPBD, Basarnas		X	X	X	X	X	X	X		

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
		penggunaan peralatan PB.											
	Menyelenggarakan gladi berkala untuk jenis – jenis bencana dengan indeks tinggi di kantor – kantor pemerintah dan sekolah.	Terselenggara gladi berkala untuk gempa dan tsunami di kantor pemerintah dan sekolah minimal 2x setahun (minimal 5 kabupaten/kota)	BPBD Prov, BPBD Kabupaten.	Dinsos, BMKG, Bappeda, Basarnas, Dinkes, Din Infokom, Dinas Pendidikan.	X	X	X	X	X		X	X	X
	Menyusun Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.	Laporan kajian dan rekomendasi tindak lanjut	BNPB, BPBD Prov	Dinsos, Basarnas, Perg. Tinggi	X	X	X			X	X		
	Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah.	Ada pengadaan berdasarkan rekomendasi kajian.	BNPB, BPBD	Bappeda	X	X	X	X	X	X			
	Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana	Ada perencanaan dan laporan yang transparan dan prosedur/mekanisme pengadaan yang bisa ditelusuri balik.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Bappeda	X	X	X	X	X	X	X		
	Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana.	Ada dokumen strategi dan mekanisme penyediaan cadangan listrik untuk penanganan darurat bencana yang bisa digunakan sebagai panduan strategi serupa di kabupaten – kabupaten.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	ESDM, swasta, LSM, Orgs PBB		X	X	X		X	X		
	Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana.	Ada SOP pemenuhan kebutuhan pangan yang mengadopsi standar-standar kebutuhan dasar nasional dan bisa digunakan oleh kabupaten – kabupaten.	BPBD Prov, BPBD Kab/Kota, Dinas Sosial, Bulog	Dinas Ketahanan Pangan, Swasta, LSM, Orgs PBB	X	X	X	X	X		X	X	X
TA H AP PR A	Penyelarasan RTRW dengan peta risiko	Peta tumpang susun risiko bencana dan rencana tata	BPBD, Bappeda		X	X	X	X	X		X		

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
TAHAP PRA BENCANA Prioritas 5: Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	bencana provinsi dan kabupaten.	ruang provinsi dan kabupaten.											
	Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Penataan Ruang Daerah	Ada kesepakatan penyebaran informasi tataruang terutama yang terkait bencana kepada masyarakat.	BPBD, Bappeda	Dinas Infokom	X	X	X	X	X		X		
	Penyusunan tumpang susun peta Sekolah/Madrasah dengan peta Risiko Bencana.	Ada penyelarasan peta SMAB dan Peta Risiko Bencana NTT	BPBD, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag.	Bappeda (NTT Satu Data, Satu Peta)		X	X				X		X
	Penyusunan tumpang susun peta posisi RS/Puskesmas dengan peta Risiko Bencana dengan peta Risiko Bencana.	Ada penyelarasan peta lokasi RS/Puskesmas dengan peta Risiko Bencana NTT	BPBD, Dinas Kesehatan.	Bappeda (NTT Satu Data, Satu Peta)		X	X				X		X
	Data lokasi Destana dan sosialisasi disparitas lokasi Destana pada multistakeholders.	Ada data terpadu Destana, disparitas implementasi dan rekomendasi pemerataan lokasi Destana.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinas Sosial, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, BMKG, Bappeda, LSM, Orgs PBB.		X				X		X	X
	Pembangunan Destana	Bertambah desa – desa tangguh bencana dalam berbagai format.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinas Sosial, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, BMKG, Bappeda, LSM, Orgs PBB.	X	X	X	X	X	X		X	X
	Pembuatan aturan wajib sumur resapan/biopori untuk bangunan – bangunan baru di wilayah perkotaan.	Pegub/Perda konservasi air.	BPBD, Dinas LH	BMKG, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Tata Kota, LSM, Orgs PBB.		X					X		
	Dukungan terhadap inisiatif konservasi air, baik tanam pohon, tanam air (biopori/sumur resapan), dan sebagainya serta	Ada himbauan pemerintah untuk konservasi air sebagai bagian dari mengurangi risiko kekeringan.	BPBD, Dinas LH.	BMKG, Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Tata Kota, LSM, Perg Tinggi, Orgs PBB.	X	X	X	X	X		X	X	X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
	kebijakan yang menguatkan inisiatif tersebut.												
	Kajian PRB terhadap AMDAL bangunan atau aktivitas industri di kawasan rawan banjir dan longsor.	Ada kajian risiko bencana terhadap izin aktivitas pembangunan di wilayah rawan banjir dan longsor.	BPBD	Dinas Kehutanan, Dinas Tata Kota, Dinas LH, ESDM, BMKG, Perg. Tinggi			X	X	X		X		X
	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	Kegiatan penguatan lereng dilakukan secara berkala di lokasi rawan longsor, terutama di P. Flores.	BPBD, BPBD Kab/Kota	Dinas LH, DinHut, BMKG, LSM, Swasta, ESDM	X	X	X	X	X	X	X		X
	Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	Koordinasi untuk pemantauan pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan untuk pengurangan risiko kekeringan di Sabu, Sumba dan Flores bagian Timur.	BPBD, BPBD Kab/Kota	Dinas LH, DinHut, BMKG, LSM, Swasta, ESDM	X	X	X	X	X		X		
	Penguatan mitigasi tsunami, baik berbasis struktur maupun berbasis ekosistem.	Bertambahnya giat dan kelompok penanaman dan pemeliharaan mangrove di pesisir pantai rawan tsunami, terutama di utara Flores, utara Alor dan barat Sumba.	BNPB, BPBD, BPBD Kab/Kota	Dinas LH, DinHut, LSM, Swasta	X	X	X	X	X	X	X		X
	Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir dan Kekeringan.	Ada koordinasi dengan OPD terkait (PU, Tata Kota) untuk prioritas giat terkait di daerah rawan banjir dan kekeringan (basis peta rawan bencana).	BNPB, BPBD Prov/Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Tata Kota, DPMD	X	X	X	X	X	X	X		
	Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui	Koordinasi dengan OPD terkait untuk mitigasi longsor.	BNPB, BPBD Prov/Kab/Kota	Dinas LH, DinHut, BWS, BP DAS, DPMD	X	X	X	X	X	X	X		X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
			konservasi vegetatif DAS										
TAHAP PRA BENCANA Prioritas 6: Perkuatan Kesiapsiaga	Gladi berkala di daerah berisiko tinggi gempa bumi.	Terselenggara gladi berkala di wilayah tinggi risiko gempa bumi.	BNPB, BPBD Prov, Kab/Kota	Semua OPD di kab/kota giat gladi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi tsunami.	Rencana kontinjensi tsunami untuk kabupaten – kabupaten di pesisir Flores, Alor dan Sumba.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinkes, Disbudpar, Din.Pendidikan, Kanwil Kemenag, PVMBG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Mengembangkan SPD tsunami dengan memanfaatkan teknologi maupun kearifan lokal.	Terbangunnya SPD tsunami di Flores, Alor dan Sumba	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	PVMBG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami	Pelatihan – pelatihan dan perlengkapan evakuasi korban tsunami di Flores, Alor dan Sumba	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Din.Pendidikan, Kanwil Kemenag, PVMBG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi banjir.	Rencana kontinjensi banjir genangan (basis dataran) di Timor dan Flores	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinkes, Disbudpar, Din.Pendidikan, Kanwil Kemenag, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penguatan kapasitas masyarakat dalam hal SPD banjir dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait, serta	Terbangunnya SPD banjir di Timor dan Flores	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
	memaksimalkan kearifan lokal.												
	Penyusunan rencana kontinjenensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi longsor.	Rencana kontinjenensi longsor berbasis kawasan (punggungan bukit/gunung) di Flores dan Timor.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana tanah longsor di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.	Terbangunnya SPD longsor di Timor dan Flores	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan rencana kontinjenensi provinsi (lintas kabupaten) di daerah berisiko tinggi kebakaran lahan dan hutan.	Rencana kontinjenensi kebakaran lahan di Sumba	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.			X	X	X	X	X	X	X
	Pengembangan Sistem Peringatan Dini bencana kebakaran hutan dan lahan di daerah berisiko tinggi dengan memanfaatkan informasi dari OPD terkait dan memaksimalkan kearifan lokal.	Terbangunnya SPD kebakaran hutan dan lahan di Sumba	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.			X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan rencana kontinjenensi kawasan risiko tinggi letusan gunung api.	Rencana kontinjenensi letusan gunung api di kawasan rawan bencana (Flores dan Alor)	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, PVMBG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X			X	X	X	X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
	Mendorong perbaikan alat pendekripsi letusan gunung api dan pengembangan Sistem Peringatan Dini di kawasan risiko tinggi letusan gunung api.	Ada kajian kelayakan alat deteksi gunung api dan perbaikannya.	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota, PVMBG		X	X	X	X	X	X			
	Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi	Pelatihan, gladi dan pengadaan perlengkapan evakuasi di KRB letusan gunung api (Flores dan Alor)	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota, PVMBG ESDM	Dinsos, Dinas LH, DinHut, PVMBG, Dinas Infokom, TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X			X	X	X	X
	Penyusunan rencana kontinjensi provinsi (lintas kabupaten) berisiko tinggi banjir bandang	Rencana kontinjensi lintas kabupaten (basis DAS) di Flores dan Timor	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, BWS, BP DAS, PU TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Penguatan sistem peringatan dini kekeringan sesuai dengan rencana kontinjensi dan memaksimalkan kearifan lokal.	SPD Kekeringan di seluruh NTT	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, BWS, BP DAS, PU TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.	X	X	X			X	X	X	X
	Membuat rencana kontinjensi banjir bandang di daerah berisiko tinggi berdasarkan kajian risiko banjir bandang.	Rencana kontinjensi banjir bandang basis DAS di Flores dan Timor	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, BWS, BP DAS, PU TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.		X	X	X	X	X	X	X	X
	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	SPD banjir bandang di Flores dan Timor	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab/Kota	Dinsos, Dinas LH, DinHut, BMKG, Dinas Infokom, BWS, BP		X	X	X	X	X	X	X	X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/Kota	Ornop
				DAS, PU TNI-POLRI, Basarnas, swasta, LSM, Orgs PBB.									
TAHAP PASCA BENCANA Prioritas 7: Pengembangan Sistem Pemulihian Bencana	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Layanan Dasar Pemerintah	BNPB, BPBD Prov	LSM, Perguruan Tinggi	X	X				X	X		
	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Infrastruktur Penting	BNPB, BPBD Prov	PU, LSM, Perguruan Tinggi	X	X				X	X		
	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Rumah Penduduk	BNPB, BPBD Prov	PUPR, LSM, Perguruan tinggi, swasta	X	X				X	X		
	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana	BNPB, BPBD Prov	Dinas Ketahanan Pangan, DPMD, Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas Perindag, Dinas Sosial, LSM, Swasta	X	X				X	X		
	Penyusunan Rencana Pemulihan Psikis Korban Bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Psikis Pasca Bencana	BNPB, BPBD Prov	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.	X	X				X	X		
	Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Koordinasi OPD terkait pasca bencana.	BNPB, BPBD Prov	Semua OPD terkait.	X	X	X	X	X	X	X		
	Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Pelaksanaan rencana pemulihan	BNPB, BPBD Prov	PU, Swasta, LSM, Org PBB.	X	X	X	X	X	X	X		
	Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Rumah Penduduk	BNPB, BPBD Prov	PUPR, Swasta, LSM, Org PBB.	X	X	X	X	X	X	X		X
	Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana	BNPB, BPBD Prov	Dinas Ketahanan Pangan, DPMD, Dinas Ekonomi Kreatif, Dinas Perindag, Dinas Sosial, LSM, Swasta	X	X	X	X	X	X	X		X

Pilihan Tindakan	Kegiatan	Indikator Hasil Kegiatan	Keterlibatan		Tahun Pelaksanaan					Kontribusi Anggaran			
			Utama	Pendukung	1	2	3	4	5	Nas	Prov	Kab/ Kota	Ornop
	Pemulihan Psikis Korban Bencana.	Rencana Pemulihan dan SOP Pemulihan Psikis Pasca Bencana	BNPB, BPBD Prov	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan.	X	X	X	X	X	X	X		X